



Laporan Kegiatan

LOKAKARYA FORUM PEMANGKU KEPENTINGAN
DALAM Mendukung PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN FAKFAK



LAPORAN KEGIATAN

LOKAKARYA FORUM PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM
MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN FAKFAK



DISUSUN OLEH:
KEMITRAAN UNTUK PEMBARUAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
2019

Daftar Isi

Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I KONTEKS KEGIATAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN KEGIATAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN	4
BAB II IMPLEMENTASI KEGIATAN	6
A. IMPLEMENTASI KEGIATAN LOKA KARYA PEMBENTUKAN FORUM PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERLANJUTAN DI KABUPATEN FAKFAK.....	6
A.1 Peserta Kegiatan Loka Karya Pembentukan Forum Pemangku Kepentingan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Fakfak	6
A.2. Rangkaian Acara Kegiatan Loka Karya Pembentukan Forum Pemangku Kepentingan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Fakfak.	9
A.3. Implementasi Kegiatan Loka Karya Pembentukan Forum Pemangku Kepentingan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Fakfak. Hari Pertama, 20 Mei 2019	11
A.4. Implementasi Loka Karya Pembentukan Forum Pemangku Kepentingan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Fakfak. Hari Kedua, 21 Mei 2019.....	23
B. REKOMENDASI DAN PENUTUP.....	33
B.1. Rekomendasi.....	33
B.2. Penutup.....	34
LAMPIRAN 1: Foto Loka Karya Pembentukan Forum Pemangku Kepentingan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Fakfak.....	35
LAMPIRAN 2. Daftar Hadir Peserta Loka Karya Pembentukan Forum Pemangku Kepentingan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Fakfak ...	39
LAMPIRAN 3. Materi Loka Karya Pembentukan Forum Pemangku Kepentingan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Fakfak	40
LAMPIRAN 4. Dokumen Kesepakatan Peserta Loka Karya Pembentukan Forum Pemangku Kepentingan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Fakfak.....	41

Daftar Tabel

Tabel 1. Peserta Kegiatan Loka Karya Pembentukan Forum Pemangku Kepentingan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Fakfak.....	6
Tabel 2. Rundown Acara Kegiatan Loka Karya Pembentukan Forum Pemangku Kepentingan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Fakfak.....	9

Daftar Gambar

Gambar 1. Slide Materi tentang Kondisi Infrastruktur.....	13
Gambar 2. Slide Materi tentang Kondisi Transportasi Udara	14
Gambar 3. Slide Materi Program-Program dalam Gerbang Kaca.....	16
Gambar 4. Slide Materi tentang Kegiatan Program Sosial Tangguh LNG	18
Gambar 5. Side Materi tentang Alur Pembentukan Forum Pemangku Kepentingan....	22
Gambar 6 Ceremonial Pembukaan Kegiatan	35
Gambar 7 Pemaparan Materi Wakil Bupati Fakfak	35
Gambar 8 Sesi Diskusi Panel.....	36
Gambar 9 Pemaparan Materi Hari Pertama Sesi III	36
Gambar 10 Pemaparan Materi Hari Kedua Sesi I	37
Gambar 11 Pemaparan Materi Hari Kedua Sesi II	37
Gambar 12 Ceremonial Penutupan	38
Gambar 13 Foto Bersama Peserta Loka Karya Pembentukan Forum Pemangku Kepentingan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Fakfak ...	38

BAB I

KONTEKS KEGIATAN

A. LATAR BELAKANG

Kajian *Good Governance Assessment* memperlihatkan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Fakfak selama ini dominan menggunakan paradigma pembangunan dengan pendekatan sentralistik dan sektoral. Akibatnya beban pemerintah daerah menjadi sangat besar jika dibandingkan aktor lainnya seperti masyarakat dan sektor swasta dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Di sisi lain, implementasi kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan selama ini sebagian besar hanya berpedoman pada jalur kebijakan secara sektoral mulai dari pimpinan daerah sampai ke masing-masing instansi atau Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) secara parsial tanpa koordinasi lintas OPD, sehingga sasaran dan target pembangunan sering terjadi tumpang tindih. Hal ini yang menyebabkan terjadinya pemborosan anggaran sehingga berpotensi memperlambat pencapaian target dan sasaran pembangunan.

Pada lingkup praksis, hasil *Good Governance Assessment* juga mendapat imbas dari implementasi sistem di tingkat nasional tersebut sehingga menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Fakfak. Hal tersebut terlihat dari beberapa simtom antara lain yaitu: (1) Tidak terintegrasinya pelaksanaan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan, (2) Pelaksanaan pembangunan selama ini direncanakan dan dilaksanakan secara parsial oleh masing-masing sektor atau OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya tanpa melibatkan pihak-pihak lain seperti masyarakat sipil dan swasta; (3) Di samping pelaksanaan pembangunan selama ini direncanakan dan dilaksanakan secara parsial oleh masing-masing sektor atau OPD. Hal ini berdampak terhadap persepsi oleh masyarakat sipil dan swasta sebagai pihak-pihak selain pemerintah daerah yang menganggap bahwa pemerintah daerah merupakan pelaksana atau agen tunggal pembangunan sehingga hanya pemerintah daerah yang berkewajiban untuk merencanakan, melaksanakan, dan memantau pembangunan di daerah.

Berdasarkan pengalaman perencanaan pembangunan tersebut maka mekanisme pelaksanaan pembangunan daerah, idealnya, dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan semua pemangku kepentingan mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pemantauan. Suatu program untuk mencapai target pembangunan harus melibatkan semua pemangku kepentingan yang terkait dengan program tersebut. Dengan harapan semua pemangku kepentingan dapat mengambil peran dan fungsi dalam memberikan kontribusi secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki. Dan akhirnya, agar pembangunan dapat dijalankan secara utuh dan menyeluruh.

Pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Fakfak setiap saat terus mengalami perkembangan, namun tak bisa di pungkiri bahwa perkembangan pembangunan ini diikuti dengan berbabagi permasalahan, tantangan yang semakin kompleks sehingga dibutuhkan penanganan yang lebih baik dari Pemerintah Daerah. Salah satu program strategi yang di dorong oleh Pemerintah Daerah Fakfak dalam mendukung pertumbuhan kesejahteraan masyarakat local adalah: Program GERBANG KACA (Gerakan Membangun Kampung Bercahaya), kebijakan strategis pembangunan ini dimaksudkan untuk mendorong pembangunan berbasis dari Kampung.

Dalam era otonomi daerah saat ini pembangunan di Kabupaten Fakfak terus diarahkan kepada tercapainya tatanan kehidupan masyarakat yang sejahtera, sebagaimana Visi Kabupaten Fakfak 2016-2021 "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Fakfak yang Bermartabat, Berdaya Saing dan Sejahtera". atau di kenal dengan Motto pembangunan "Fakfak Bermitra" Untuk itu partisipasi masyarakat, perangkat daerah dan pihak-pihak tertentu (stakeholder) mempunyai peranan yang sangat dominan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Fakfak.

Berbicara tentang pentingnya membangun sinergis antar pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mendukung pembangunan daerah sangat sejalan dengan konsep sasaran program pengembangan berkelanjutan (TSDP- Tangguh LNG).

Hal ini dirasa penting, karena mempertimbangkan seiringnya dengan perkembangan Tangguh LNG, berbagai kegiatan dalam eksplorasi minyak dan gas serta kegiatan usaha lainnya mulai masuk dan berkembang di Provinsi Papua Barat dan

Kabupaten Fakfak secara khusus. Dengan masuknya berbagai perusahaan dengan membawa berbagai pendekatan dalam melakukan kegiatan usahanya dikhawatirkan akan membawa pengaruh dan konsekuensi dalam berbagai aspek baik kependudukan, ekonomi, sosial, maupun keamanan.

Disisi lain kemajuan dan pertumbuhan investasi tersebut, apabila dapat dikoordinasikan dan disinergikan dengan baik akan menjadi kekuatan yang memiliki daya dorong terhadap percepatan kemajuan pembangunan di daerah.

Untuk itu, Tangguh LNG memandang perlunya pembentukan forum kerjasama antar pemangku kepentingan yang di dalamnya terdiri dari unsur Pemerintah, masyarakat sipil dan pihak swasta yang beroperasi/berada di wilayah kabupaten Fakfak untuk mendukung pertumbuhan pembangunan di daerah tersebut. Forum kerjasama antar para pemangku kepentingan tersebut diharapkan dapat menjadi wadah untuk mensinergikan perencanaan program pengembangan masyarakat, melakukan pembagian peran dan tanggung jawab, serta mendorong munculnya kebijakan dalam pengembangan masyarakat dan pembangunan di wilayah Kabupaten Fakfak.

Secara umum, partisipasi semua pemangku kepentingan juga sejalan dengan peraturan perundangan dan kebijakan sebagai berikut:

1. Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional,
2. Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota,
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, perlu dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam kurun waktu 2010-2014,
6. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

7. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2017 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor: 1 Tahun 2014, dan Juklak Sesmen PPN Nomor 3/6/2014 Tentang Penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Nasional (RPJMN) 2014-2019.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan RPJMD.

Mengacu pada sejumlah regulasi tersebut, Kegiatan pembentukan forum pemangku kepentingan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan mempunyai signifikansi yang tinggi untuk dilakukan di Kabupaten Fakfak. Melalui forum ini, potensi kolaborasi dan integrasi antar para pemangku kepentingan (yaitu pemerintah daerah, masyarakat sipil dan pihak swasta) dapat teridentifikasi. Kegiatan ini juga dapat menginventarisasi pola koordinasi dan integrasi yang paling memungkinkan untuk memastikan sinergi peran dalam pelaksanaan program pembangunan.

B. TUJUAN KEGIATAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN

Secara umum, **Kegiatan Loka Karya Pembentukan Forum Pemangku Kepentingan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Fakfak** mempunyai maksud untuk membentuk sebuah forum semua pemangku kepentingan yang ke depan akan bersinergis dengan Pemerintah Daerah dalam mendukung proses pembangunan daerah di Kabupaten Fakfak.

Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan beberapa para pemangku kepentingan sebagai langkah awal, yang mana dalam forum ini akan duduk bersama

antar OPD terkait dengan sektor swasta yang berasal dari KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) seperti: Tangguh LNG; sector masyarakat sipil dan; sector PERBANKAN. Mereka akan memaparkan secara singkat pengalaman dan pandangan mereka dalam upaya berkontribusi terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Fakfak. Ke depan, setelah secara kelembagaan mulai berjalan, forum ini akan diperluas untuk pemangku kepentingan lainnya dan diharapkan yang akan menjadi leading sector adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak. Adapun, tujuan dari kegiatan:

1. Mengidentifikasi potensi kolaborasi dan integrasi antar para pemangku kepentingan.
2. Menyusun mekanisme yang disepakati bersama sebagai forum pemangku kepentingan di Kabupaten Fakfak.
3. Membangun komitmen semua pemangku kepentingan untuk mengelola forum sebagai salah satu instrumen untuk mendukung proses pembangunan daerah di Kabupaten Fakfak.

Sedangkan hasil yang diharapkan dari **Kegiatan Loka Karya Pembentukan Forum Pemangku Kepentingan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Fakfak** adalah:

1. Adanya inventarisasi potensi kolaborasi dan integrasi antar para pemangku kepentingan di Kabupaten Fakfak
2. Adanya mekanisme yang disepakati bersama sebagai forum pemangku kepentingan di Kabupaten Fakfak.
3. Adanya satu dokumen komitmen bersama untuk mengelola forum semua pemangku kepentingan sebagai instrumen untuk mendukung proses pembangunan daerah di Kabupaten Fakfak.

BAB II

IMPLEMENTASI KEGIATAN

A. IMPLEMENTASI KEGIATAN LOKA KARYA PEMBENTUKAN FORUM PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERLANJUTAN DI KABUPATEN FAKFAK.

Pada tataran implementasi, kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan sejumlah metode pengelolaan forum, seperti: pengelolaan forum paparan pelaku kebijakan, pengelolaan forum paparan ahli, pengelolaan forum dinamika kelompok dengan melibatkan sejumlah narasumber yang terdiri atas: Unsur Pemerintah Kabupaten Fakfak, Unsur Industri Migas, Unsur Kementerian Dalam Negeri dan *pool of Expert dari Kemitraan*. “*Kegiatan Loka Karya Pembentukan Forum Pemangku Kepentingan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Fakfak*” dilaksanakan pada tanggal 20-21 Mei 2019 di Kabupaten Fakfak.

A.1 Peserta Kegiatan Loka Karya Pembentukan Forum Pemangku Kepentingan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Fakfak

Kegiatan Loka Karya Pembentukan Forum Pemangku Kepentingan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Fakfak ini akan diikuti oleh 45 orang peserta yang terdiri dari:

1. Unsur sektor privat di Kabupaten Fakfak (Tangguh LNG, Perbankan: BNI, BRI, Bank Mandiri, Bank Papua).
2. Unsur Pemerintah Daerah Kab. Fakfak.
3. Unsur Perguruan Tinggi (Politeknik Negeri Fakfak)
4. Unsur NGO Lokal (Yayasan Yamiko).

Adapun sebaran peserta dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. Peserta Kegiatan Loka Karya Pembentukan Forum Pemangku Kepentingan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Fakfak

NO	NAMA	JABATAN
1	Ir. A Sopahluwakan	Wakil Bupati
2	Ali Baham Temongmere	Plt Sekertaris Daerah Kab. Fakfak

3	Gondo Suprapta	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Fakfak
4	Vera	BRI
5	Honai Sangadji	BRI
6	Lince Major	Dinas Pemberdayaan Perempuan
7	Rudy Nuruddin	Bank Mandiri
8	Kanexsius Iba	BPD Kab. Fakfak
9	Ruslan Kororor	Yamiko (NGO)
10	Hidayat Alhamid	Tanggung LNG
11	Fahmi M. Tukwain	Tanggung LNG
12	Ahmad Lisaholet	Tanggung LNG
13	B.M Lesomer	Sek Dinas Perindag
14	Yeni S Iha	Kasubag Perekonomian
15	Elitely R	Dinas Lingkungan Hidup
16	Frans Rumere	Kasubag Program Dinas Kesehatan
17	Piet R Nataubun	Kasubag Perencanaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
18	Joko Purnomo	Asisten I
19	Abd Jabar Uswanas	Sekertaris Dinas
20	Manuel Fateh	Tanggung LNG
21	Antonius I Haans	Wadir I Politeknik Negeri Fakfak
22	Sofyan Noch	Ajudan Wabup
23	Ahmad Raaf'i	Staf Dinas Pertanian
24	Satrinety	Staf Politeknik Negeri Fakfak
25	Eksan Musa'ad	Sekertaris BP4D
26	Taklim R	Polres Fakfak
27	Achmad Fauzi	Staff BP4D
28	Halima La Alimuda	Staf Bidang Ekonomi
29	Septon M	Staf Humas dan Protokoler
30	Karel Kabes	Staf Humas dan Protokoler
31	Yohanes Kabes	Staf Humas dan Protokoler
32	Yustus T	Staf Bid Program Dinas Perikanan
33	Moh Faris Heremba	Staff BP4D

34	JantjeTupalesy	Kasie PMK DPMK
35	Aris	Wartawan
36	Fransiskus Paji	Staf BP4D
37	Abdullah Kasogat	Kasubbid Tata Ruang BP4D
38	Muhammad La Gale	Kasubbag Program Perindag
39	Parluhutan Siregar	Kasubag Program Dinas Pertanian
40	Yoel Rohrohmana	Staf Khusus Bupati
41	Ishak S Patipi	DPMK
42	Charles Kambu	Asisten II
43	Lily F W	Staf Pemda Fakfak
44	Kamarudin Tereng	Kanit Ops Polres Fakfak
45	A Faizal	Staf Pemda Fakfak
46	Emanuel Matombre	Tanggung LNG
47	Dr Pascalis Taa	Tanggung LNG
48	M Bustomi	Kemitraan
49	Suleman Samuda	Kemitraan
50	Miftah Adhi Ikhsanto	Kemitraan
51	Pedro Sirait	Kemitraan

A.2. Rangkaian Acara Kegiatan Loka Karya Pembentukan Forum Pemangku Kepentingan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Fakfak.

Kegiatan Loka Karya Pembentukan Forum Pemangku Kepentingan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Fakfak dilakukan pada tanggal 20-21 Mei 2019 di Kabupaten Fakfak. Untuk lebih jelasnya susunan acara kegiatan dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2. Rundown Acara Kegiatan Loka Karya Pembentukan Forum Pemangku Kepentingan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Fakfak

HARI PERTAMA			
Rabu, 21 Maret 2019			
NO.	WAKTU	KEGIATAN	PIC
1.	08.00-08.30 WIT	Registrasi	- Kemitraan
2.	08.30-09.00 WIT	Pembukaan Sambutan-Sambutan 1. Perwakilan LNG-Tanggung 2. Wakil Bupati Kab. Fakfak sekaligus membuka acara	- Tangguh LNG - Wakil Bupati Kab. Fakfak
3	09.00-10.30 WIT	Pemaparan Visi-Misi Pemerintah Kabupaten Fakfak dan Pencapaian Pembangunan	- Wakil Bupati Kab. Fakfak
4	10.30-10.45 WIT	<i>Coffe Break</i>	- Kemitraan
5.	10.45 -13.00 WIT	1. Peranan Pemangku Kepentingan Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Fakfak. 2. Komitmen Program Sosial Tangguh LNG Dalam Mendukung Program Sosial Berkelanjutan di Daerah 3. Diskusi & Tanya Jawab	- Kepala BP4D Kabupaten Fakfak - Tangguh LNG - Kemitraan
4.	13.00-14.00 WIT	Ishoma	- Kemitraan
5.	14.00-15.15 WIT	Peran Pihak Ketiga (Swasta) dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Berkelanjutan.	- Dr. Hariawan Bihanding, MT dari BPSDM, Kementerian Dalam Negeri
6.	15.15-15.30 WIT	Istirahat dan <i>coffe break</i>	- Kemitraan

HARI KEDUA Jum'at, 22 Maret 2019			
NO.	WAKTU	KEGIATAN	PIC
1.	08.30-10.00	Identifikasi Aktor, Potensi Kolaborasi dan Integrasi Sektoral Program Pengembangan Masyarakat antara Pihak Swasta & Pemerintah	- Kemitraan
2.	10.00-10.30	<i>Coffee Break</i>	- Kemitraan
3.	10.30-12.00	Simulasi Pemetaan Aktor dan Potensi Kolaborasi dan Integrasi sektoral Program Pengembangan Masyarakat antara Pihak Swasta dan Pemerintah	- Kemitraan
4.	12.00-13.00	Ishoma	- Kemitraan
5.	13.00-15.00	Penyusunan Kesepakatan Mekanisme Kolaborasi dan Integrasi serta Komitmen Keberlanjutan Integrasi	- Kemitraan
6.	15.00-15.30	<i>Coffee Break</i>	- Kemitraan
7.	15.30-16.00	Sambutan Penutupan: 1. Perwakilan Tangguh LNG 2. Wakil Bupati Fakfak	- Tangguh LNG - Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak

A.3. Implementasi Kegiatan Loka Karya Pembentukan Forum Pemangku Kepentingan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Fakfak. Hari Pertama, 20 Mei 2019

Kegiatan pada hari pertama diawali dengan ceremonial pembukaan, berikut susunan Acara ceremonial Pembukaan:

1. Pembukaan Kegiatan:

- Pembacaan Doa
- Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
- Sambutan-Sambutan
 - Sambutan Tangguh LNG yang disampaikan oleh Hidayat Al Hamid
Prinsip dasar dari *co creation* adalah untuk *prosperity*, intinya adalah kita harus saling melayani untuk menjadi hidup lebih baik. Ketika hidup sudah baik maka kita akan mencapai *co exist*. Kita menghadapi banyak masalah untuk menghadapi masalah yang kita hadapi maka kita harus lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Bagaimana kita mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh seluruh stakeholder adalah kunci dari pertemuan yang akan kita lakukan selama dua hari kedepan. Dengan potensi yang kita miliki kita akan mengetahui *positioning* dalam membangun jaringan untuk mengatasi keterbatasan yang kita miliki untuk melayani masyarakat dengan komitmen yang dirumuskan secara bersama. Tangguh LNG berkeinginan untuk menjadi mitra yang baik bagi pemerintah daerah dalam membawa perubahan bagi masyarakat.
 - Sambutan sekaligus membuka secara resmi Kegiatan, yang disampaikan oleh Wakil Bupati Kab Fakfak.
Forum Multi Stakeholder merupakan perpaduan antara Teori dan Praktis dalam pengelolaan pembangun daerah, dimana satu tangan tidak akan melakukan pekerjaan, dua tangan juga tidak akan dapat menyelesaikan satu pekerjaan tetapi banyak tangan akan dapat menyelesaikan beberapa pekerjaan. Untuk itu diharapkan dalam menyelenggarakan

pembanguna daerah Fakfak dapat dicapai secara maksimal sehingga diharapkan dengan ada Forum Multistakeholder di Kabupaten Fakfak dapat mendorong pencapaian program-program prioritas daerah.

2. Catatan dinamika Forum

Kegiatan pada hari pertama diawali dengan pemaparan Wakil Bupati Kab. Fakfak mengenai Visi-Misi dan pencapaian pembangunan Pemerintah Kab. Fakfak. Sesi kedua diisi dengan *panel discussions* yang di pandu oleh Suleman Samuda. Materi sesi kedua disampaikan oleh Kepala BP4D Kab. Fakfak dan Perwakilan Tangguh LNG. Untuk sesi ketiga disampaikan oleh Dr. Hariawan Bihamding (BPSD Kemterian Dalam Negeri). Berikut dinamika forum hari pertama:

a. Dinamika Sesi I

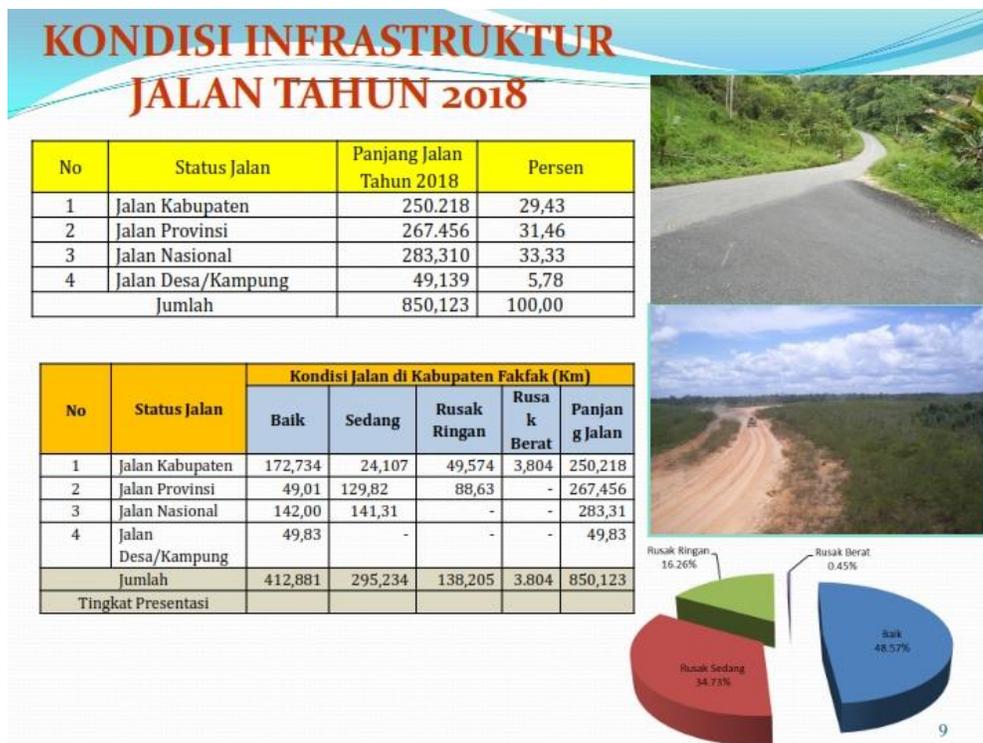
1) Paparan Materi tentang Pemaparan Visi-Misi Pemerintah Kabupaten Fakfak dan Pencapaian Pembangunan (Wakil Bupati Fakfak)

Dalam pemaparan materi, narasumber mengawali dengan memberi penjelasan mengenai Visi Pemerintah Kab. Fakfak. Visi adalah sebuah gambaran dalam membangun segala sesuatu. Penting bagi kepala daerah dalam membangun daerah harus mengacu pada Visi yang telah disusun, karena visi adalah tujuan yang hendak dituju oleh Kepala Daerah dalam menahkodai Pemerintahan. Visi Pemerintah Kab. Fakfak 2016-2021 “**TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN FAKFAK YANG BERMARTABAT, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA**”. Pembangunan Kabupaten Fakfak dalam visi dan misi yang di emban selama 5 Tahun 2016-2021 memiliki motto “**FAKFAK BERMITRA**”. Motto ini sebagai harapan mendorong semangat membangun yang dilandasi oleh nilai-nilai keakraban dan persahabatan yang berakar pada nilai “**Satu Tungku Tiga Batu Satu Hati Satu Negeri**” sebagai modal dasar pembangunan. “Fakfak Bermitra” sebagai Motto yang ingin diwujudkan dalam upaya menjalin silaturahmi untuk mencapai visi dan misi pembangunan Fakfak 2016-2021 dengan gerakan Membangun kembali di Mulai dari Kampung.

Dengan demikian “Fakfak Bermitra” sebagai Motto yang ingin diwujudkan dalam menjalin silaturahmi/bersahabat untuk mencapai visi dan

misipembangunan Fakfak 2016-2021 dengan gerakan Membangun kembali yang diMulai dari Kampung atau melalui gerakan membangun kampung bercahaya(GERBANG KACA).

Penjelasan kemudian dilanjutkan dengan menampilkan pencapaian pembangunan yang telah diraih dalam 3 tahun terakhir. Untuk infrastruktur Jalan, Kondisi Jalan saat ini sudah bisa dikatakan layak namun pada beberapa wilayah kondisi jalan rusak tetapi bukan berarti tidak ada perbaikan saat ini dengan dana yang terbatas pemerintah daerah mengutamakan prioritas jalan yang akan meningkatkan perekonomian masyarakat.



Gambar 1. Slide Materi tentang Kondisi Infrastruktur

Begitupun dengan kondisi transportasi, untuk transportasi Udara saat ini Pemerintah Kabupaten Fakfak sementara menyiapkan relokasi Bandara ke wilayah Siboru, karena Bandara Udara Torea sudah maksimal pengembangannya sehingga perluasan runway sangat tidak disarankan karena kondisi topografi yang tidak memungkinkan untuk dikembangkan. Transportasi laut sendiri, saat ini wilayah Fakfak bertumpu pada transportasi laut yang

sudah bisa di singgahi kapal dengan *tonase* besar seperti kapal penumpang Pelni dan Kapal Kargo.

KONDISI TRANSPORTASI UDARA THN 2018

Uraian	Spesifikasi
Nama	Bandara Torea Fakfak
Panjang Runway	1.260 meter
Lebar Runway	60 meter
Status	Kelas III
Jarak dr Pusat Kota	7 km
Didarati oleh	Wings ATR 72-500 dan Express Dornier 328
Ujung Runway	Kondisi curam namun dapat dikembang hingga 150 m
Jalur Penerbangan	Wings Air : Fakfak-Kaimana-Ambon-Surabaya-Makasar-Jakarta (Terbang Tiap hari) Fakfak-Kaimana-Nabire-Jayapura, PP Fakfak-Sorong-Manokwari, PP
	Express Air (Fakfak-Sorong-Jkta), PP, Penerbangan Lintas Papua Barat
	Penerbangan antar wilayah Provinsi Papua & PB
Direncanakan Relokasi Bandara dengan Pembangunan Bandara Baru "Bandara Regional Siboru" di Fakfak	




Gambar 2. Slide Materi tentang Kondisi Transportasi Udara

Gerbang Kaca merupakan sebuah program untuk melengkapi kampung dengan berbagai pendekatan: Realistis, Holistik, komprehensif dan Final. Tujuan yang ingin dicapai dari program Gerbang Kaca adalah melakukan percepatan dan optimalisasi pembangunan di kampung agar setara dengan kota serta kampung memiliki daya saing dari berbagai aspek pembangunan. Sasaran yang ingin dicapai adalah Gerbang Kaca dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pelaksanaan pembangunan kampung, pengelolaan potensi sumber daya kampung dalam meningkatkan produktivitas dan kampung bisa mandiri serta berswawakelola yang berkelanjutan sehingga kampung semakin produktivitas dengan memiliki daya saing yang kuat dan menjadikan Satu Kampung Satu Produk Unggulan (*one village, one product*) sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Pada titik ini, tentunya dapat dijadikan *entry point* pihak ketiga untuk terlibat dalam membangun kampung mengingat dalam Gerbang Kaca sendiri terdapat 5 fokus kegiatan yakni: 1). Pengembangan ekonomi lokal; 2). Pemberdayaan Masyarakat; 3). Pembangunan Sarana dan Prasarana Kampung; 4). Penguatan Kelembagaan Kampung; 5). Pengembangan Wilayah Kampung. Dari fokus tersebut pihak ketiga dapat mengambil peran dengan menyesuaikan program sosial yang dimiliki untuk disinergikan dan diselaraskan dengan fokus kegiatan dalam program Gerbang Kaca.

b. Dinamika Sesi II

1) Paparan Materi Peranan Pemangku Kepentingan Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Fakfak (Ali Baham Temongmere | Kepala BP4D Kab. Fakfak)

Pemaparan Materi diawali dengan menyampaikan bahwa kata kunci dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan pembangunan adalah “peran stakeholder”, ketika stakeholder dapat berperan lebih maka pembangunan dapat bergerak dan terus tumbuh, sebaliknya bila stakeholder tidak berperan maka bisa dipastikan proses pembangunan akan terhenti. Stakeholder bisa siapa saja, jika mengacu pada regulasi yang berlaku maka stakeholder adalah pelaku pembangunan.

Kalau berbicara pembangunan sejatinya kita akan menyentuh tiga hal yakni:

- Growth
- Equity
- Sustainability

Tiga hal tersebut yang seharusnya menjadi dasar dalam proses pembangunan. Pembangunan tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan, tetapi pertumbuhan yang disertai dengan pemerataan. Dan pertumbuhan juga harus berkelanjutan.

Dalam proses pembangunan sendiri ada tiga tahapan. Setiap stakeholder atau pemangku kepentingan yang nantinya akan bergabung dalam forum pemangku

kepentingan perlu untuk menentukan dimasa posisi mereka dari tiga tahapan tersebut. Tiga tahapan yang dimaksud meliputi:

- Resque → tidak ada pertumbuhan atau dengan kata lain pembangunan sedang dalam masa krisis
- Recovery → Pada tahapan ini, pembangunan difokuskan pada pemulihan dengan cara mengidentifikasi potensi yang dimiliki untuk memaksimalkan kinerja agar tercapai pertumbuhan yang ditargetkan.
- Sustainability → Keberlanjutan, Pembangunan tidak lagi berfokus pada pemulihan tetapi mulai berpikir pada bagaimana tetap mempertahankan pertumbuhan dan tetap mengejar target peningkatan pembangunan.

Untuk itu diharapkan Pihak Ketiga dapat menentukan dimana letak focus program sosial mereka saat ini, apakah mau berada pada wilayah rescue atau recovery atau juga pada tahapan sustainability? Hal ini semata-mata agar pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing pihak dapat bersinergi dan tidak terkesan berjalan sendiri-sendiri.

**Program Unggulan Daerah
Tahun 2016-2021**

1. **GERBANG KACA** (Gerakan Membangun Kampung Bercahaya)
2. Bantuan Beasiswa 1000 Mahasiswa Asal Kab. Fakfak
3. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
4. Penerapan E-Government
5. Penerapan Standart Pelayanan Publik dan SPM Urusan Wajib
6. Mendukung Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi
7. Peningkatan Program Strategis Kabupaten (Infrastruktur Jalan, Rencana Bandara Siboru, dan Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh KSCT)
8. Penataan Kawasan Perkotaan Fakfak
9. Peningkatan Program Fakfak Terang
10. Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah



The image contains three maps. The leftmost map is a detailed site plan of a development area with various colored zones and infrastructure. The middle map is a regional map of Fakfak, Indonesia, showing its location and surrounding areas. The rightmost map is a satellite view of the Siboru airport area, with a red circle highlighting a specific location. Below the satellite map, there is a small text box that reads: '- Arah Rumahnya yang sudah di sesuaikan dengan hasil Pemukiman Windowsa (dominan) - Batas kawasan Bandara menurut koordinat dari dinas kehutanan'.

Gambar 3. Slide Materi Program-Program dalam Gerbang Kaca

Selanjutnya pemateri menjelaskan tentang Program prioritas Gerbang Kaca. Gerbang Kaca merupakan bagian dari program unggulan, kalau diinventarisir ada 8 program unggulan di tingkat kampung. Kondisi kampung yang masih jauh dari standar kelayakan sehingga Pemerintah daerah merasa perlu untuk mendesain sebuah program yang nantinya akan mengakomodir usulan-usulan kampung yang berjumlah 124 kampung. Melalui program gerbang kaca dalam setiap tahun sekitar 25 kampung akan tersentuh oleh program gerbang kaca. Keterbatasan anggaran seringkali menjadi kendala tersendiri dalam merealisasi program yang telah disusun untuk direncanakan.

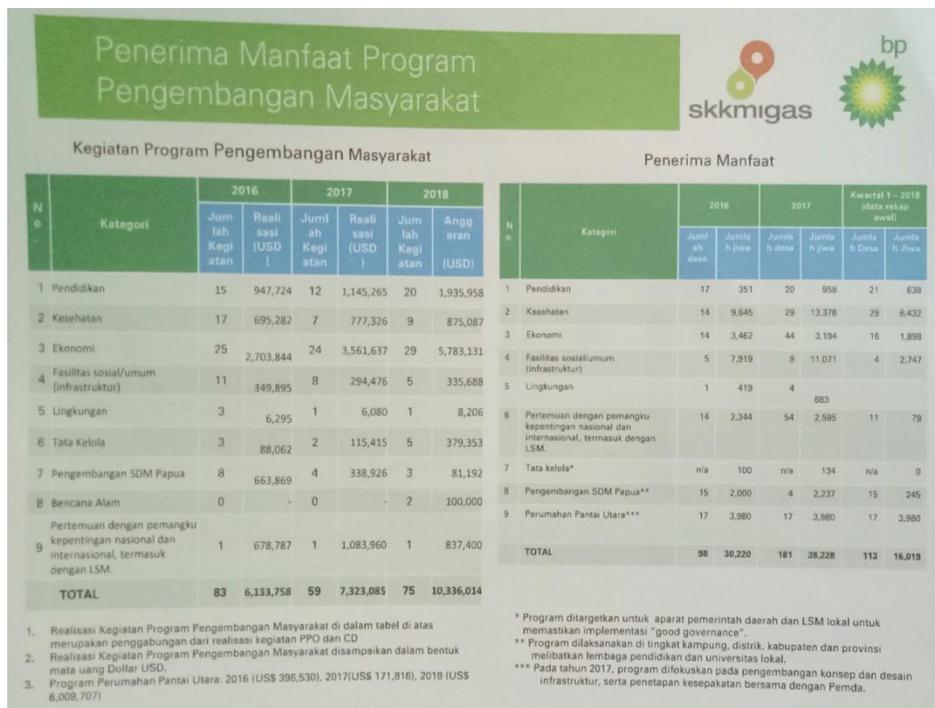
Dengan mengusung konsep pembangunan kampung ideal yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2016-2021, GERBANG KACA menjadi Program unggulan dalam pelaksanaan pembangunan yang dimulai dari kampung dengan harapan untuk mendorong akselerasi pembangunan kampung agar lebih merata serta produktif sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa fokus pada program ini adalah penyediaan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat serta peningkatan pusat-pusat pertumbuhan baru terutama di wilayah distrik sebagai upaya untuk memperkuat struktur perekonomian bagi masyarakat dan pemerataan pembangunan. Sehingga dapat mengurangi disparitas antar penduduk maupun antar wilayah.

a. Paparan Materi Komitmen Program Sosial Tangguh LNG dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan (dr. Pascalis Taa | Tangguh LNG)

Pemateri mengawali dengan mengutip pendapat dari Pak Ali Baham yang menyatakan bahwa ada tiga tahapan dalam pembangunan yakni, fase rescue, fase recovery dan fase sustainability. Tangguh sendiri lebih berperan pada tahapan sustainability karena saat ini dalam program sosial tangguh sudah focus pada keberlanjutan.

Saat ini, Program Sosial Tangguh LNG tidak hanya focus pada wilayah kerja tetapi pada beberapa kegiatan, penerima manfaat program sosial mulai melibatkan penerima manfaat diluar wilayah kerja Tangguh LNG misalnya pada kegiatan yang baru selesai dilakukan pada awal bulan Mei. Dimana kegiatan

pelatihan dan pendampingan manajemen data keuangan kampung melibatkan 40 Pendamping Distrik (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD). Hal ini menunjukkan bahwa Tangguh LNG berkomitmen bersama-sama dengan Pemerintah kab. Fakfak untuk urun rembug dan melakukan aksi bersama guna memajukan masyarakat Fakfak.



Gambar 4. Slide Materi tentang Kegiatan Program Sosial Tangguh LNG

Selanjutnya pemateri menyampaikan milestone program Papuan development dengan merujuk pada dokumen Amdal Tangguh LNG. Dalam dokumen Amdal tertuang bahwa pada tahun 2029 rasio tenaga kerja di operasi Tangguh LNG sebesar 85 %. Saat ini, isu yang selalu menerpa bisnis proses dari tangguh LNG berkisar mengenai tenaga kerja. Seperti yang diketahui bahwa dalam merekrut tenaga kerja Tangguh LNG memiliki karakteristik diantara: *low skill*, *semi skill* dan *full skill*. Dengan demikian Tangguh LNG dalam merekrut tenaga kerja pada waktu sekarang lebih focus pada penerimaan semi skill dan full skill. Untuk itu, ada beberapa program yang sudah berjalan dalam menunjang pemenuhan tenaga kerja yang semi skill dan full skill meliputi:

- 112 Pemuda (50 % perempuan) dari sekitar Teluk dan Papua Barat direkrut untuk mengikuti program pemagangan teknis selama 3 tahun untuk mengisi kebutuhan tenaga terampil di operasi Tangguh
- Memfasilitasi Politeknik Negeri Fakfak sebagai pusat pelatihan keterampilan bersertifikasi
- 9 Pemuda Papua mengikuti program challenger dan Leadership di BP sejak tahun 2014
- 5 Tenaga Kerja Papua mendapat kesempatan untuk penugasan internasional.
- Rasio tenaga kerja Papua 51 % dan 329 diantara adalah pegawai terampil atau supervisor/manager.

Pemaparan Materi diakhiri dengan mengajak seluruh peserta Lokakarya untuk menonton video yang berdurasi 5 menit. Video tersebut berisi informasi mengenai program challenger dan leadership.

b. Respon Forum

Respon yang diberikan oleh peserta atas materi yang disampaikan oleh pemateri meliputi:

- Output dari kegiatan ini lebih diarahkan untuk membentuk forum yang baru atau menindaklanjuti program-program yang telah dilaksanakan selama ini, mengingat Tangguh LNG bersama dengan Pemda Fakfak sudah bekerjasama dalam kurun waktu yang lama. Sehingga menurut peserta forum hari ini sebaiknya lebih diarahkan untuk membentuk forum tidak perlu lagi dipaparkan materi-materi,
- Pembentukan kelembagaan dari Forum Pemangku Kepentingan sebaiknya dalam bentuk *joint task* saja dan pembiayaan kelembagaan diserahkan kepada pihak ketiga.
- Sepakat membentuk Forum Pemangku Kepentingan untuk Kab. Fakfak

c. Dinamika Sesi I

1) Paparan Materi tentang Peran Pihak Ketiga (Swasta) dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Berkelanjutan (Dr. Hariawan Bihanding, MT dari | BPSDM, Kementerian Dalam Negeri)

Materi yang disampaikan oleh pemateri adalah signifikansi pembentukan forum pemangku kepentingan. Signifikansi lebih ditandai sebagai penekanan bahwa separuh keberhasilan adalah perencanaan dan separuh keberhasilan dari perencanaan adalah keterlibatan. Hasil yang maksimal akan bisa dicapai apabila ada keterlibatan dan sinergitas seluruh pihak. Pembangunan merupakan suatu usaha terencana untuk menuju kearah yang lebih baik atau dengan kata lain pembangunan adalah sebuah perubahan. Tujuan dari pembangunan adalah level of living, self esteem dan Freedom.

Pembangunan adalah upaya untuk mengubah keadaan menuju kondisi yang lebih baik/lebih sejahtera. Unsur penting atau yang lebih dikenal dengan anatomi pembangunan yang diperlukan untuk pembangunan daerah adalah :

- Kebijakan Pemerintah, untuk meletakkan arah penggunaan sumber daya pada sasaran yang tepat dan menghadirkan regulasi yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh *value added* yang maksimal.
- Ketersediaan Infrastruktur, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menjalankan usaha dengan biaya yang relatif rendah.
- Ketersediaan Modal, alat untuk melakukan proses produksi;
- Sumberdaya manusia sebagai faktor produksi utama yang ikut menentukan kualitas dan kuantitas produksi
- Bahan baku, untuk memberikan keuntungan yang lebih besar dalam dunia usaha.

Forum Pemangku Kepentingan sebenarnya sudah ada regulasinya yang memperlihatkan bahwa pelibatan pihak eksternal pemerintah dalam proses pembangunan tidak dilarang. Regulasi tersebut terdiri atas:

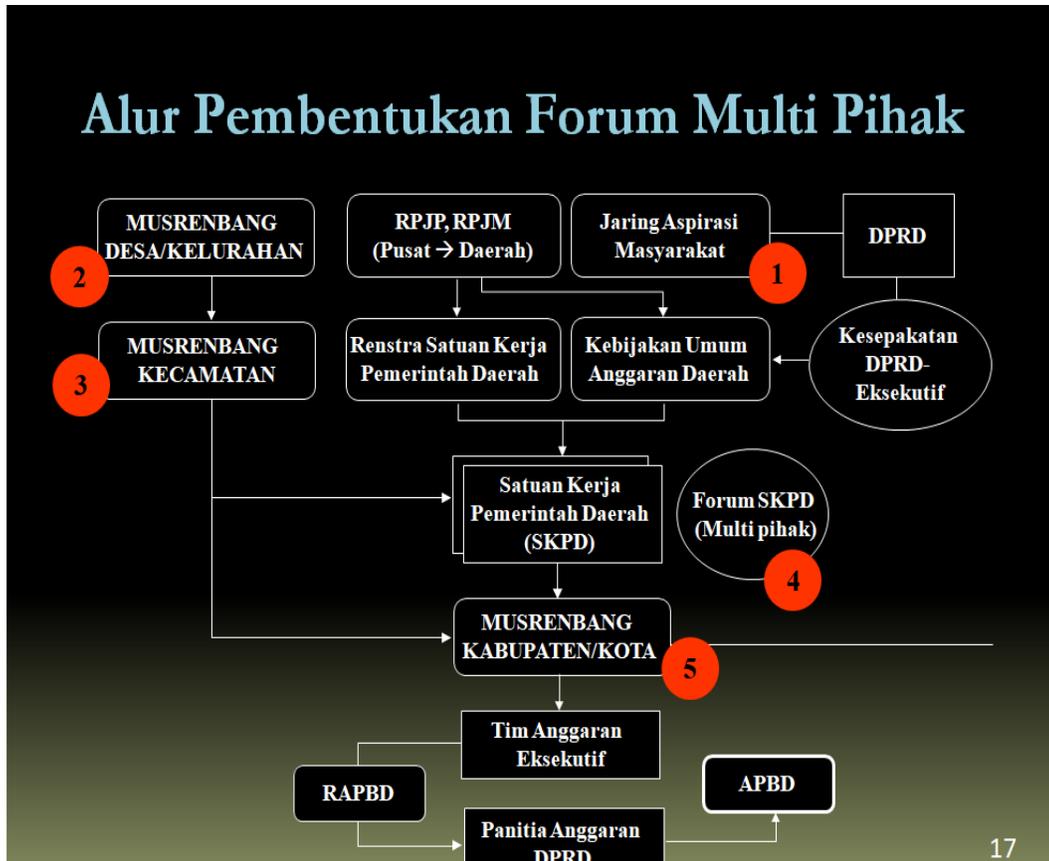
- Pada Pasal 2 UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanahkan bahwa: Pembangunan Nasional

diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara.

- Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- Undang-undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
- Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019;Permendagri No. 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Permendagri No. 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

Muara dari pembentukan Forum Pemangku Kepentingan yang pertama adalah bagaimana mereproduksi program-program pembangunan yang bisa mensejahterakan masyarakat dan yang kedua bagaimana kita mensinergikan kapasitas yang dimiliki semua Stakeholder, diluar Stakeholder Pemerintah

Daerah, juga mensinergikan potensi dan kapasitas yang selama ini tersebar yang pastinya tujuannya untuk mendorong ekonomi masyarakat



Gambar 5. Side Materi tentang Alur Pembentukan Forum Pemangku Kepentingan

2). Respon Forum

Ada tanggapan yang disampaikan oleh beberapa peserta meskipun tidak secara khusus tanggapan tersebut diarahkan untuk mempertajam arah diskusi pembentukan forum pemangku kepentingan tetapi lebih mengarah pada bagaimana menyikapi anomaly pembangunan. Tanggapan tersebut meliputi:

- Ahmad Lisaholet → Mengajak seluruh peserta khususnya dari OPD terkait untuk menyikapi persoalan pemalangan jalan dan penyanderaan boat BP ketika berlabuh di dermaga Kokas. Menurut penanya bahwa persoalan tersebut bila diamati terlihat pola jelas adanya *setingan* oleh oknum yang memiliki kuasa structural untuk menekan pihak perusahaan agar dapat

memenuhi tuntutan mereka, lebih lanjut lagi pemalangan makin marak terjadi ketika mendekati hari-hari besar. Hal seperti ini diharapkan menjadi *concern* kita bersama dalam membangun Fakfak kedepan.

- Joko Santoso (Assisten I Bupati Fakfak) → Dalam proses pembangunan pemerintah seringkali mengabaikan aspek pendidikan dan lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi belaka, padahal ekonomi dapat tumbuh jika pelaku pembangunan memiliki tingkat pendidikan yang cukup. Bila kita amati pembangunan pada level nasional maupun level daerah hal tersebut terjadi dimana pemerintah lebih mementingkan infrastruktur dan mengabaikan aspek pendidikan. Sebaiknya kedepan pembangunan lebih diprioritaskan kearah peningkatan SDM.

Mendapat pertanyaan dari dua (2) peserta, pemateri mengutarakan bahwa pada setiap periode kepemimpinan ada prioritas pembangunan dan bukan mengabaikan aspek yang lain, misalnya saat ini pemerintah Jokowi-Jk lebih focus pada pembangunan infrastruktur, ini bukan berarti pemerintah mengabaikan aspek yang lain tetapi ini semata-mata hanya sekedar strategi mobilisasi sumberdaya yang tersedia. Keadan seperti ini seharusnya menjadi indikasi dalam merencanakan kerjasama pihak diluar pemerintah dengan pemerintah agar lebih diarahkan pada aspek yang kurang mendapat prioritas pemerintah. Untuk pemalangan jalan, alangkah baiknya dibicarakan dan diselesaikan dalam Forum Pemangku Kepentingan yang nantinya akan segera dibentuk.

A.4. Implementasi Loka Karya Pembentukan Forum Pemangku Kepentingan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Fakfak. Hari Kedua, 21 Mei 2019

Pada hari kedua, bila merujuk pada *rundown* kegiatan penyampaian materi dibagi kedalam 3 sesi. Namun sesuai dengan perkembangan forum Lokakarya, pemaparan materi disampaikan dalam dua sesi yakni identifikasi Aktor dan Potensi Kolaborasi Integrasi Sektoral Program Pengembangan Masyarakat antara Pihak Swasta &

Pemerintah dan kemudian dilanjutkan dengan Penyusunan Kesepakatan Mekanisme Kolaborasi dan Integrasi serta Komitmen Keberlanjutan Integrasi. Secara umum, materi yang disampaikan pada hari kedua adalah:

a) Dinamika Sesi I

1) Paparan Materi Identifikasi Aktor, Potensi Kolaborasi dan Integrasi Sektoral Program Pengembangan Masyarakat antara Pihak Swasta & Pemerintah (Miftah Adhi Ikhsanto | KEMITRAAN)

Pemangku kepentingan' menurut definisinya adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan untuk keberlanjutan tata kelola pemerintahan. Clarkson membagi Pemangku kepentingan menjadi dua: Pemangku kepentingan primer dan Pemangku kepentingan sekunder. Pemangku kepentingan primer adalah 'pihak di mana tanpa partisipasinya yang berkelanjutan tata kelola pemerintahan tidak dapat bertahan.' Contohnya adalah parlemen, organisasi pemerintah, birokrasi, dan aparat pemerintahan.

Pemangku kepentingan sekunder didefinisikan sebagai 'pihak yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pemerintah, tapi mereka tidak terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan dan tidak begitu penting untuk kelangsungan hidup pemerintahan.' Contohnya adalah media dan berbagai kelompok kepentingan tertentu. Pemerintahan tidak bergantung pada kelompok ini untuk kelangsungan mengganggu pembuatan kebijakan publik.

Pemangku kepentingan juga telah didefinisikan lebih sempit lagi di mana Pemangku kepentingan didefinisikan sebagai suatu kelompok atau individu yang menanggung suatu jenis risiko baik karena mereka telah terlibat dalam proses pembuatan kebijakan public secara langsung, ataupun karena mereka menghadapi risiko akibat kegiatan pembuatan kebijakan public tersebut. Karena itu, Pemangku kepentingan adalah pihak yang akan dipengaruhi secara langsung oleh kebijakan publik

Dalam proses pembuatan kebijakan public, analisa pemangku kepentingan dapat dilakukan dengan sejumlah langkah, antara lain:

a. Identifikasi pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan dapat diidentifikasi dalam kategori:

- Pemangku kepentingan utama (primary stakeholder), merupakan pemangku kepentingan yang secara langsung terkena dampak, baik positif maupun negatif dari adanya kebijakan publik.
- Pemangku kepentingan kunci (key stakeholder), merupakan pemangku kepentingan yang secara legalitas memiliki kewenangan atau dengan kata lain memiliki pengaruh dan kepentingan yang tinggi dalam pengambilan keputusan pada proses pembuatan kebijakan publik.
- Pemangku kepentingan pendukung (secondary stakeholder), merupakan pemangku kepentingan sebagai perantara dalam proses implementasi kebijakan publik ataupun pihak-pihak yang tidak memiliki kaitan secara langsung tetapi memiliki kepedulian atas keputusan kebijakan publik.

b. Pengelompokan dan pengategorian pemangku kepentingan.

Untuk mengklasifikasi dan mengategorikan pemangku kepentingan digunakan analisis kategorisasi yang mengklasifikasikan pemangku kepentingan berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh (Eden & Eckermann, 1998; Bryson, 2004; Reed et al., 2009). Metode yang digunakan untuk mengklasifikasikan pemangku kepentingan adalah menggunakan matriks kepentinganpengaruh (interestinfluence matrix) berdasarkan kepentingan atau ketertarikan dan pengaruh pemangku kepentingan (Eden dan Ackermann, 2013) terhadap penyusunan kebijakan publik.

Pemangku kepentingan dikelompokkan menjadi pemain kunci, context setters, subjects dan crowd. Pemain kunci memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi. Context setters memiliki pengaruh yang tinggi tapi kepentingannya rendah. Subjects memiliki kepentingan yang tinggi tetapi pengaruhnya rendah, sedangkan crowd adalah pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah.

Matriks kepentingan-pengaruh dapat menjadi alat untuk memetakan tingkat kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan terhadap suatu isu berdimensi 2 x 2.

Dalam menentukan tingkat kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan digunakan modifikasi dari analisis terhadap kepentingan dan agenda pemangku kepentingan berdasarkan Grimble (1998). Menurut Grimble (1998) kepentingan dan agenda pemangku kepentingan dapat dilihat dari: kepentingan pemangku kepentingan, dampak potensial, tingkat kepentingan relatif dan pengaruh kelompok.

Saat pemaparan materi tentang matriks stakeholder, pemateri mendapat tanggapa dari beberapa peserta. Tanggapa peserta meliputi:

- Tanggapan yang disampaikan oleh Asisten II Pemda Fakfak yang mengatakan bahwa “kita tak perlu terlalu banyak membuang waktu dengan menyampaikan beberapa materi, karena bagi kami yang terpenting adalah segera membentuk forum ini seperti apa, karena menurut saya dari kemarin kita terlalu banyak disuguhin konsep-konsep yang menurut saya kita sudah memahami apalagi saya sebagai seorang dosen tentunya sudah sangat memahami sehingga menurut saya jangan terlalu banyak membuang-buang waktu, sekarang saya menawarkan kepada forum agar segera kita buat kesepakatan untuk membentuk forum yang dimaksud.
- Assisten I Pemda fakfak juga mengajukan hal yang sama dengan menyatakan bahwa sebaiknya sekarang kita langsung pada inti dari lokakarya ini yakni dengan membentuk forum pemangku kepentingan. Apapun nama forum dan bentuk forum sebaik saat ini kita sepakati agar jangan terlalu banyak membuang-buang waktu, dan mohon agar Kemitraan menyampaikan konsep forum ini seperti apa kepada kita agar kita memiliki gambaran tentang struktur forum ini seperti apa.
- Tanggapan dari Staf Khusus Bupati Bidang Luar Negeri. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh peserta sebelumnya yakni segera kita bentuk forum pemangku kepentingan.

Mendapat respon dari peserta yang lebih menginginkan agar segera dibentuk forum pemangku kepentingan, pemateri segera menyiapkan slide perumusan kesepakatan dan forum diserahkan kepada Suleman Samuda untuk memandu jalannya diskusi perumusan forum pemangku kepentingan.

b) Dinamika Sesi II

1) Penyusunan Kesepakatan Mekanisme Kolaborasi dan Integrasi serta Komitmen Keberlanjutan Integrasi (Suleman Samuda. | KEMITRAAN)

Sebelum memulai diskusi pemateri meminta kepada peserta khususnya dari Pihak Perbankan untuk memaparkan program-program sosial mereka, maksud yang ingin dicapai dengan memberikan kesempatan kepada pihak swasta adalah untuk memetakan potensi sumberdaya yang bisa dijadikan sebagai bagian dari sumberdaya forum pemangku kepentingan yang bisa dimobilisasi dalam kerangka bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Fakfak dalam membangun Fakfak kedepan agar lebih maju dan sejahtera. Kesempatan pertama diberikan kepada Bank Papua dan dilanjutkan dengan pihak BRI.

Dalam memberikan penjelasan pihak Bank Papua menjelaskan bahwa selama ini ada program kredit yang dikucurkan kepada UMKM sebagai bagian dari mengembangkan UMKM sebagai pilar ekonomi daerah dan Negara, dalam pelaksanaannya pihak Bank Papua telah memberikan pembiayaan berupa kredit mikro kepada masyarakat diwilayah Distrik Arguni dan sekitarnya khususnya untuk *men-supply* Ikan ke pihak Tangguh LNG. Kemudian diperjelas lagi oleh dewan penasihat Bank Papua dengan mengutarakan saat ini pihak Bank Papua sedang merintis kerjasama dengan pihak LNG Tangguh dengan focus pada dana sebesar U\$ 2.000.000,- yang dimiliki oleh pihak Tangguh LNG agar ditempatkan di kas Bank Papua yang nantinya digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit ke UMKM dan kelompok usaha masyarakat lainnya.

Selanjutnya Pihak BRI memberi penjelasan bahwa, khusus untuk BRI sendiri ada program sosial dibawah naungan program *BRI Peduli*. Di Kabupaten Fakfak sendiri program *BRI Peduli* pada tahun 2018 telah merenovasi beberapa sekolah yang kondisinya rusak, program tersebut sudah berlangsung sekitar 3 tahun.

Moderator diskusi perumusan kesepakatan pembentukan forum pemangku kepentingan kemudian meminta kesepakatan forum untuk merumuskan *rule of the game* dalam pengambilan keputusan guna mencapai kesepakatan. Forum secara bulat menyepakati bahwa keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Sesaat sebelum memulai diskusi, beberapa peserta mengajukan interupsi diantaranya adalah Kepala Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian.

- Dinas Kesehatan → Mengutarakan saat ini ada beberapa program dibidang kesehatan yang diadopsi dari program BP diantaranya adalah program memberantas malaria, kemudian Dinas kesehatan sendiri saat ini mengalami kendala dalam dalam melaksanakan program karena keterbatasan anggaran dan sumberdaya ditingkat kampung sehingga kedepan diharapkan dengan keterbatasan yang dimiliki, pihak Tangguh LNG dapat membantu Dinas Kesehatan dalam memperkuat kapasitas staf dilapangan.
- Dinas Pendidikan → Untuk Dinas Pendidikan sendiri telah bekerjasama dengan Pihak Tangguh LNG diantaranya adalah pendirian rumah pintar yang berada di wilayah Kokas dan rencananya hari ini akan diresmikan. Kedepan diharapkan dengan adanya Forum Pemangku Kepentingan kerjasama antara pihak ketiga dan Pemerintah Kabupaten Fakfak dapat dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.
- Dinas Pertanian → Alangkah baiknya kerjasama antara pihak Tangguh LNG dan Pemerintah Kab. Fakfak khususnya Dinas Pertanian lebih diarahkan untuk memenuhi ketersediaan daging ayang dan telur karena selama ini kebutuhan telur dan daging ayam di penuhi dengan cara

mendatangkan daging ayam potong dan telur ayam dari Surabaya, tentunya hal seperti ini tidak baik dalam jangka panjang sehingga diharapkan pihak tangguh LNG dapat menyediakan tenaga ahli yang akan mendampingi peternak local dalam memulai usahanya sama halnya dengan Tangguh LNG melakukan pendampingan kepada petani.

Selanjutnya moderator mempertegas kembali mengenai posisi Forum Pemangku Kepentingan agar Forum ini nantinya akan berbeda dengan forum-forum perencanaan lainnya yang mempertemukan multi stakeholder. Posisi Forum Pemangku Kepentingan adalah:

- Bertujuan untuk mempertemukan semua pemangku kepentingan utama dalam bentuk forum pemangku kepentingan untuk percepatan pembangunan Fakfak yang lebih focus pada isu strategis bukan persoalan teknis;
- Posisi dan relasi antar pihak didasarkan pada pengakuan akan pentingnya mencapai kesetaraan dan akuntabilitas dalam komunikasi antar pemangku kepentingan;
- Melibatkan seluruh unsur dalam mengisi posisi pada struktur Forum Pemangku Kepentingan.
- Bertujuan untuk mengembangkan kemitraan dan memperkuat jaringan antara dan di antara para pemangku kepentingan.

Selanjutnya Moderator menguraikan jenis-jenis forum pemangku kepentingan yang dipraktikkan diberbagai daerah diantaranya meliputi:

- a. **Forum Komunikasi** Tujuan forum ini adalah untuk menentukan mekanisme bagaimana pihak satu dengan pihak yang lain saling bertukar informasi dan berkomunikasi secara efektif melalui sebuah media saluran informasi. Karakteristik utama forum komunikasi adalah wadah bersama untuk tukar menukar informasi antar pihak.
- b. **Forum Koordinasi** Tujuan forum koordinasi adalah menentukan bagaimana pihak satu dengan pihak yang lain bertemu untuk

membahas sebuah agenda atau rencana kerja, terutama membahas isu-isu teknis penyelenggaraan program atau agenda kerja bersama. Dalam forum koordinasi ini lebih banyak berbicara soal siapa mengerjakan apa, bagaimana caranya, dan siapa bertanggung jawab atas apa.

- c. **Forum Pengambilan Kebijakan** Tujuan forum pengambilan kebijakan adalah menentukan bagaimana sebuah keputusan dibuat, bisa melalui konsensus, pemilihan suara terbanyak, atau quorum. Konsensus adalah kesepakatan kata atau permufakatan bersama (mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya) yang dicapai melalui kebulatan suara terbanyak. Quorum adalah jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam rapat, majelis, dan sebagainya (biasanya lebih dari separuh jumlah anggota) agar dapat mengesahkan suatu putusan. Prinsip politik dari forum pengambilan kebijakan adalah demokrasi, musyawarah mufakat, keadilan bersama, akuntabilitas, dan keterbukaan. Forum pengambilan kebijakan tersebut juga menjadi forum dialog atau musyawarah untuk menentukan atas dasar apa sebuah kebijakan dibuat dan diputuskan.

Setelah menguraikan jenis-jenis pemangku kepentingan forum diskusi dipandu secara bergantian oleh Miftah Adhi Ikhsanto dan Suleman Samuda untuk mencapai kesepakatan bersama, berikut dirangkum kesepakatan bersama yang diputuskan dalam diskusi perumusan forum pemangku kepentingan:

1. Berdasarkan pada kesepakatan bersama antara sesama peserta Forum Pemangku Kepentingan diberi nama **“Forum Koordinasi Pemangku Kepentingan Untuk Percepatan Pembangunan di Kabupaten Fakfak”**.
2. **Forum Kordinasi** dipilih secara aklamasi oleh mayoritas peserta Lokakarya sehingga forum yang dibentuk adalah **forum yang berfungsi sebagai wadah kordinasi yang banyak berbicara soal siapa mengerjakan apa, bagaimana caranya, dan siapa bertanggung jawab atas apa.**
3. Dasar Hukum dari Forum Koordinasi Pemangku Kepentingan Untuk Percepatan Pembangunan di Kabupaten Fakfak adalah **Peraturan Bupati.**

4. Sekeretariat sementara dari Forum Koordinasi Pemangku Kepentingan Untuk Percepatan Pembangunan di Kabupaten Fakfak bertempat di Kantor BP4D Kab. Fakfak.
5. Pembentukan Kelompok Kerja untuk mempersiapkan kelengkapan kelembagaan. Kelompok Kerja tersebut meliputi:
 - Sekertaris BP4D Fakfak
 - Asisten I
 - Staf Khusus Bupati Bidang Hubungan Luar Negeri
 - Staf Ahli Bidang Pemerintahan
 - Tangguh LNG
 - Kemitraan Indonesia
 - BRI
 - Bank Papua
 - Bank Mandiri
 - BNI
 - Rimbun Sawit
 - Politeknik Negeri Fakfak
6. Struktur Forum Koordinasi Pemangku Kepentingan Untuk Percepatan Pembangunan di Kabupaten Fakfak (dilihat pada tabel dibawah ini)

Struktur Forum Koordinasi Pemangku Kepentingan Untuk Percepatan Pembangunan di Kabupaten Fakfak

No	Jabatan	Nama
1	Pembina	Bupati Wakil Bupati
2	Penasehat	Sekretaris Daerah SKK Migas PAMALU Kepala BP4D StafKhususBupati
3	Ketua	Sekretaris BP4D FAKFAK
4	Wakil Ketua	Papua Affair Manager Tangguh LNG
5	Sekretaris	1. Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan 2. Bank Papua
6	Kordinator Bidang Tata Kelola Pemerintahan	Asisten I
7	Wakil Kordinator Bidang Tata Kelola	KEMITRAAN INDONESIA

	Pemerintahan	
8	Kordinator Bidang Pemberdayaan Ekonomi	Asisten II
9	Wakil Kordinator Bidang Pemberdayaan Ekonomi	BRI
10	Kordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Staf Ahi Bidang Pemerintahan
11	Wakil Kordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	PPDM
12	Anggota	Unsur Pemerintah Daerah
		Unsur Perguruan Tinggi
		Unsur Industri Perbankan
		Unsur Industri Migas
		Unsur Industri Perkebunan

B. REKOMENDASI DAN PENUTUP

B.1. Rekomendasi

Dalam lingkup programatik, melalui **Loka Karya Pembentukan Forum Pemangku Kepentingan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Fakfak**.

Merumuskan sejumlah rekomendasi, antara lain:

- a. Pembentukan Forum Pemangku Kepentingan yang diberi nama Forum Koordinasi Pemangku Kepentingan Untuk Percepatan Pembangunan di Kabupaten Fakfak.
- b. Bentuk Forum ini adalah forum koordinasi dan dikukuhkan dalam sebuah produk hukum setingkat Peraturan Bupati. Selain sebagai wadah untuk membuat rencana tindak lanjut yang bersifat keberlanjutan untuk menjawab kondisi faktual dan aktual dengan model *sharing resources*, forum ini juga di dorong untuk *sharing* informasi dan koordinasi guna integrasi program.

Adapun rencana tindak lanjut sebagai salahsatu kesepakatan dalam lokakarya akan dipaparkan melalui tabel di bawah ini:

No	Level Intervensi	Kesepakatan Forum
1.	Level Makro	Dasar Hukum Forum Pemangku Kepentingan setingkat Peraturan Bupati
2.	Level Mezo	<ul style="list-style-type: none">▪ Perlu SOP Kordinasi untuk Tata Kelola Pemerintahan▪ Perlu SOP Kordinasi untuk Pemberdayaan Ekonomi▪ Perlu SOP Kordinasi untuk Pemberdayaan Masyarakat▪ Perlu SOP Organsasi dan Manajemen Forum SOP disusun oleh Tim Kerja 12 orang dengan komposisi: <ul style="list-style-type: none">▪ Sekertaris BP4D Fakfak▪ Asisten I▪ Staf Khusus Bupati Bidang Hubungan Luar Negeri▪ Staf Ahli Bidang Pemerintahan▪ Tangguh LNG▪ Kemitraan Indonesia▪ BRI▪ Bank Papua▪ Bank Mandiri▪ BNI▪ Rimbun Sawit▪ Politeknik Negeri Fakfak
3.	Level Mikro	Sekretariat Forum bertempat di BP4D Fakfak

B.2. Penutup

Laporan ini diajukan oleh **Partnership for Governance Reform Indonesia (PGRI)** kepada Tangguh LNG, sebagai bagian dari instrumen monitoring dan evaluasi. Dalam lingkup programatik laporan ini, secara substantif dan manajerial, telah memperoleh legalisasi dari **Partnership for Governance Reform Indonesia(PGRI)**.

Jakarta, 2 Juni 2019

Dewi Rizki
Program Director

Miftah Adhi Ikhsanto
Program Manager

LAMPIRAN 1: Foto Loka Karya Pembentukan Forum Pemangku Kepentingan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Fakfak



Gambar 6 Ceremonial Pembukaan Kegiatan



Gambar 7 Pemaparan Materi Wakil Bupati Fakfak



Gambar 8 Sesi Diskusi Panel



Gambar 9 Pemaparan Materi Hari Pertama Sesi III



Gambar 10 Pemaparan Materi Hari Kedua Sesi I



Gambar 11 Pemaparan Materi Hari Kedua Sesi II



Gambar 12 Ceremonial Penutupan



Gambar 13 Foto Bersama Peserta Loka Karya Pembentukan Forum Pemangku Kepentingan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Fakfak

LAMPIRAN 2. Daftar Hadir Peserta Loka Karya Pembentukan Forum Pemangku Kepentingan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Fakfak



Event

Lokasi

Hari/ Tanggal

: Lokakarya Pembentukan Forum Pemangku Kepentingan dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Fakfak

: Grand Papua Hotel Fakfak

: Senin, 20 Mei 2019



No	Nama	Instansi	Jabatan	Telpon	Tanda Tangan
01	Vera	BRI	DO Program	08114100968	
02	Honai Saugedgi	SAKSI	SPV	085254846013	
03	Lince MAJOR	Pembudayaan Perempuan	PAIS	081321012497	
4	Rudy Nuruddin	DK-MANDIRI	BM	081242544058	
5	KANEXIUS SMA	BPD FFK	Peng. Dep. Lasmun	08123 158 2276	
6	Ruslan Karoror	XAMIKO	Fond. Kelenbaum	081344323732	
7	Ir. A. SOPAHELUWAKAN, M.S.	PEMDA FFK	WAKIL BUPATI	081248201770	
8	Fransisca Herietronggi	Koperasi	sub Program		
9	Hidayat Alhamid	BP	CEA	08119551894	
10	Fachmy M.T	BP	C&EA IEDP	08124039925	



Event

: Lokakarya Pembentukan Forum Pemangku Kepentingan dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Fakfak

Lokasi

: Grand Papua Hotel Fakfak

Hari/ Tanggal

: Selasa, 21 Mei 2019



TANGGUH LNG



No	Nama	Instansi	Jabatan	Telpon	Tanda Tangan
1	Frans Rumere	Dimas Kesehatan	Kasubag program	081344363733	
2	Paruhutan Singer	Dimas Pertanian	-	081248330709	
3	Abdul Jabar Ulfan ds	DIKRAS	Sekretaris	081347705127	
4	Anthonius Ls. Haans	Policekemik	wadir I	082187453593	
5	JOHN RAHAIL	UNLEN		081354040142	
6	B. M. LESOMAR	DISDAGPRIND	SEKRETARIS	081248165871	
7	Lin. MAJOR	Perempuan Dis. Pamboddayaan	Kasub. bid	0821012497	
8	Achmad Fanni. S.E	BAPPEDA	KASUB BID STRATEGIK	081344574319	
9	YEWIE. S. IHA	SETDA FF	KASUBAG SARANA PEREKONOMIAN	082197646802	
10	JANJE TUPA LESSY	DPMK	KASI PMK	081343160300	



Event

Lokasi

Hari/ Tanggal



TANGGUH LNG



: Lokakarya Pembentukan Forum Pemangku Kepentingan dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Fakfak

: Grand Papua Hotel Fakfak

: Selasa, 21 Mei 2019

No	Nama	Instansi	Jabatan	Telpon	Tanda Tangan
11	Ahmad Raafii	Dinas Pertanian	Staf Subbay Progra	085254529517	
12	FACHMY M. TUKUWAIN	CREA	IEDP SPL	08124039925	
13	Vera	BRI	RM	08114100908	
14	Honai Sangedoi	BRI	SPV	085254846013	
15	Noel Fateq	BP	Education off.	081227843891	
16	Yustus Tuturap.	Perikanan	staf program	085254667705	
17	Kavensius (M)	BPD	Pop Larman	08123 158 2276	
18	Yoei Rokrohmana	Pen da	staf khusus bupati	08111160295	
19	MOH. PARIS HEREMBA	BAPPEDA	KASUBBID	085244579330	
20	ABDULLAH KASONGAT	BAPPEDA	Kasybed	081248086000	



Event

Lokasi

Hari/ Tanggal

: Lokakarya Pembentukan Forum Pemangku Kepentingan dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Fakfak

: Grand Papua Hotel Fakfak

: Selasa, 21 Mei 2019



TANGGUH LNG



No	Nama	Instansi	Jabatan	Telpon	Tanda Tangan
21	AHMAJ. LISAHOLET	TIEDP	Mentor	082198556678	
22	RUSLAN KAROROR	YAMIKO	Kord. Keluhan	081344363732	
23	HALIMA LA ALIMUDA	BP4D	staf. Ek.	081240197050	
24	Lily Fugleane Waniwan	Pemda	Kasubag PembMag	081247687604	
25	Franisca Heri Ewenggi	Koperasi Dinas Pertanian & Ket. Panyan	Kasubag Program		
26	PIPT R. Notanubun	Dinas Pertanian & Ket. Panyan	Kasubag Program	082239352288	
27	MUHAMMAD LA GACE	PERINDAG	Kasubag Program	0822 3935 2288	
28	Ishak. S. Pattipi	DPMK	KABID	082199134562	
29	Charles Kambu	SETDA	AS II	081247252277	
30	Joko Purmanu	Setda	AS I	081344705986	



Event

Lokasi

Hari/ Tanggal



TANGGUH LNG



- : Lokakarya Pembentukan Forum Pemangku Kepentingan dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Fakfak
- : Grand Papua Hotel Fakfak
- : Selasa, 21 Mei 2019

No	Nama	Instansi	Jabatan	Telpon	Tanda Tangan
31	Amatus.R	PERS	Biro	095244017754	
32	VITALIS	SETDA	SOPIR:AS.II	082238607783	
33	Suleman Samuda	Kemitraan			
34	Harisawan B	Cceedyn	Manru	081527663777	
35	Conelo Suprpto	Dinkes	ka Diskes	081344038590	
36	SOFYAN NOCHI	PEMDA FFK	ADC WABUP	081248201770	
37	Pedro Sirait	Kemitraan	Finance	0821 1007 1889	
38	Moh Bustom	Kemitraam	Field. Coordinator	0813 9898 1500	
39	Miffah Adhi	Kemitraan	Proj. Manager	0812 2728 2855	
40	Djijin		Fasilitator Lokal	0822 4822 4622	



Event

Lokasi

Hari/ Tanggal



TANGGUH LNG



: Lokakarya Pembentukan Forum Pemangku Kepentingan dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Fakfak

: Grand Papua Hotel Fakfak

: Senin, 20 Mei 2019

No	Nama	Instansi	Jabatan	Telpon	Tanda Tangan
11	AYMAS. LNA46LET	TINEDP	mentor	082198556670	
12	B.M. LESOMAR	DISDAGPIND	SEK	081248165871	
13	YENIE. S. IHA	SETDA	KASUBAG SARANA PEREKONOMIAN	082197646802	
14	Chiklie Rahadima	SLHP	Kadiv	081247863293	
15	Frans Rumere	Dinas Kesehatan	kebidan program	081344363733	
16	Ple R. Notambun	Dinas Pertanian dan Ket. Pangan	Konvensional perikanan	081344108170	
17	Joko Purnomo	Setda	AS I	081344705986	
18	Gondo Suprpta	Pinkes	ke Bidan	081344038590	
19	ABD JARA Umar	Diknas	fabrikasi	081342705722	
20	Mancel Faten	BP	Ekst OFF.	081227043851	



Event

Lokasi

Hari/ Tanggal



TANGGUH LNG



: Lokakarya Pembentukan Forum Pemangku Kepentingan dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Fakfak

: Grand Papua Hotel Fakfak

: Senin, 20 Mei 2019

No	Nama	Instansi	Jabatan	Telpon	Tanda Tangan
21	Anthonyus LS. Haans	Politelemk	Wadir I	082187453593	
22	SOFYAN NOCH	PEMDA FFK	ADC WABUP	081248201770	
23	Lily Fufuare Waniwan	- us	Kecab. Pemb. Masy	081247687604	
24	Ahmad Raafii	Dinas Pertama	Staf Progra	08254529315	
25	SATRINETI	POLITEKNIK	Staf	082238625383	
26	EKSAN MURANO	Ambyem	Sejabat	081344441854	
27	Thelina . R	polkes #	DA. RES #.	08112896802	
28	ACHMAD FAZIL, SE	BAPPADA	Kuasi	081344514315	
29	HALIMA . L	BPAD	Staf Bid. Eko.	081240197050	
30	Hariawan B	Kecerdasan	Manajemen	081327667779	



Event

Lokasi

Hari/ Tanggal



TANGGUH LNG



- : Lokakarya Pembentukan Forum Pemangku Kepentingan dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Fakfak
- : Grand Papua Hotel Fakfak
- : Senin, 20 Mei 2019

No	Nama	Instansi	Jabatan	Telpon	Tanda Tangan
31	Sep ton. M	HUMAS DAN. PRODUKSI	STAF	082399666155	
32	KAREL KABES	— 11 — 11 —	— 11 —	081344911981	
33	YOHANES KABES	— 11 —	— 11 —		
34	Yustus. Tutump.	Perikema	Staf program	085254667705	
35	MOH. PARIS HEREMBA	BAPPEDA	KASUBSID		
36	JANTJE TUPALESSY	DPMK	KASI PUK	081343160306	
37	ATIS	PERS	Kartawana	085244017754	
38	FRANSISKUS PAJI	DAPPEDA	STAF	081240046655	
39	ABDULLAH KASONGAT	BAPPEDA	Kasubid Tata ruang	081240036900	
40	MUHAMMAD LA GALA	PERINDAG	KASUBAG PROGRAM	0822 3935 2280	



Event

Lokasi

Hari/ Tanggal

: Lokakarya Pembentukan Forum Pemangku Kepentingan dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Fakfak

: Grand Papua Hotel Fakfak

: Senin, 20 Mei 2019



TANGGUH LNG



No	Nama	Instansi	Jabatan	Telpon	Tanda Tangan
41	Kamarudin Tereng	POLRES FAKFAK	KANIT OPS		
42	Drs. A.B. REMONGIMERE, MT	PT. SETDA	PT. SEKDA		(ADC)
43	PARWUTAN SUGAR	Distum	—		
44	Yoel Rohodimana	staf khusus Pupada	Penda		
45	Shah Pattippi	DPMK	KABID		
46	A. Farza FAKFAK	bsg. pem	kyubg. pem kampung da telukha		
47	Suleman Samade	Kemitraan			
48	Pedro Sirait	Kemitraan	Finance	082110071009	
49	Moh Bustom	Kemitraan	Field Coordinator		
50	Miftah Adhi Iksanto	Kemitraan	Proj. Manager		

LAMPIRAN 3. Materi Loka Karya Pembentukan Forum Pemangku Kepentingan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Fakfak



PERANAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Fakfak



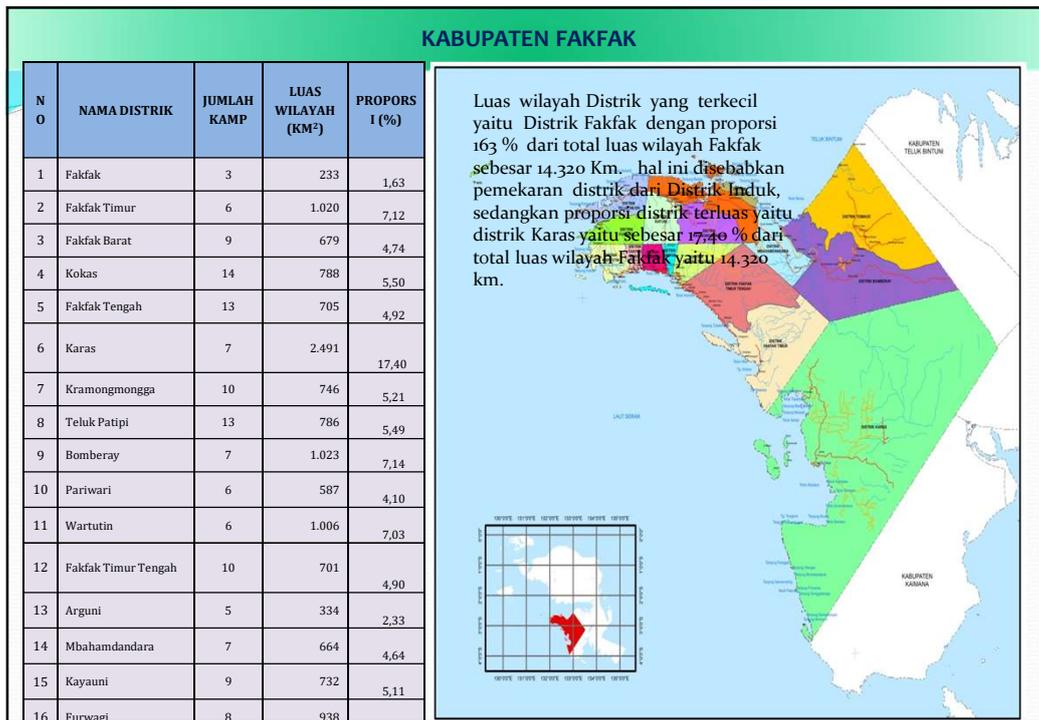
**PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT**

MMN
Disampaikan

GAMBARAN UMUM KAB.FAKFAK

- Luas Wilayah : 14.320 Km²
- Letak : 131°30' – 138°40' BT dan 2°25' - 4°00' LS.
- Dibatasi oleh : Teluk Bintuni, Kab. Kaimana, Laut Seram, Teluk Berau, Laut Arafura
- Distrik dan Kampung : 17 Distrik dan 142 kampung
- Jumlah Penduduk : 76.102 jiwa Tahun 2017 (versi BPS) data kependudukan jumlah jiwa 86.0000
- Keberadaan Penduduk : Bermukim di lereng/bukit (26,40 %), Pesisir (53,60%)
- Potensi Ekonomi : Perikanan, Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Bahan Galian, Minyak dan gas bumi.
- Karakter Masyarakat : Terbuka, religius, kekeluargaan, Toleransi tinggi
- Sikap Pemda : Terbuka, akomodatif
- Situasi Keamanan : Sangat Kondusif





Misi

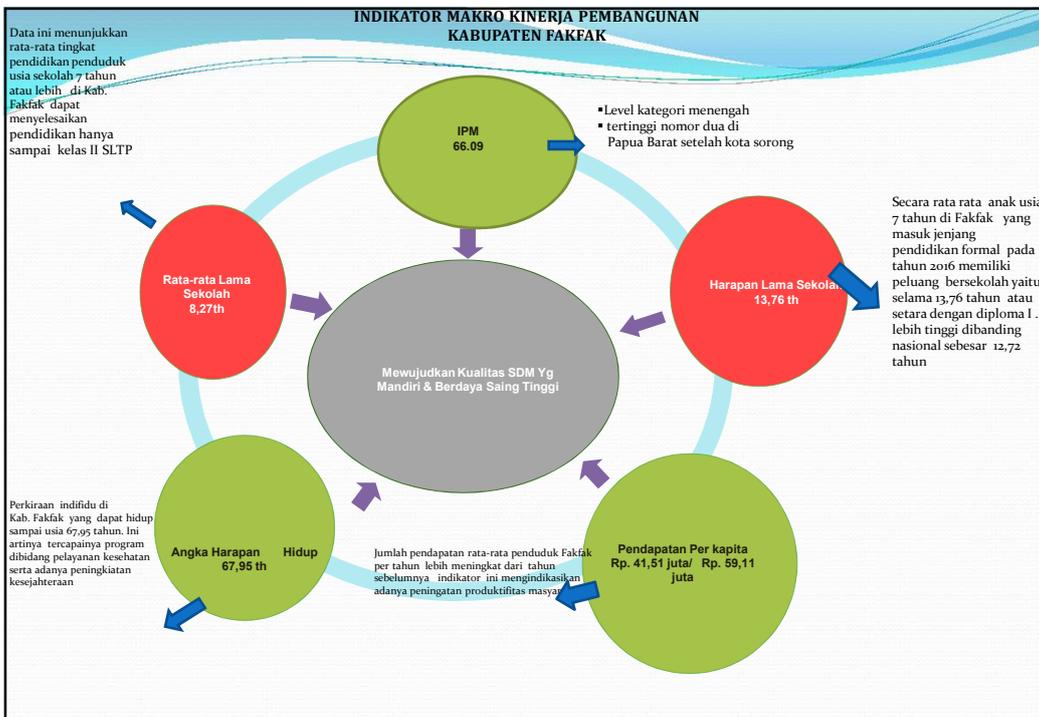
1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan.
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, produktif dan inovatif melalui penyediaan akses pelayanan pendidikan yang berkualitas, murah dan berkeadilan.
3. Meningkatkan pelayanan dan derajat kesehatan yang bermutu dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penciptaan lingkungan yang sehat, dan nyaman.
4. Mengembangkan perekonomian daerah yang tangguh, berdaya saing dan berkeadilan melalui pemberdayaan dan peningkatan produktivitas masyarakat secara lestari dan menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan.

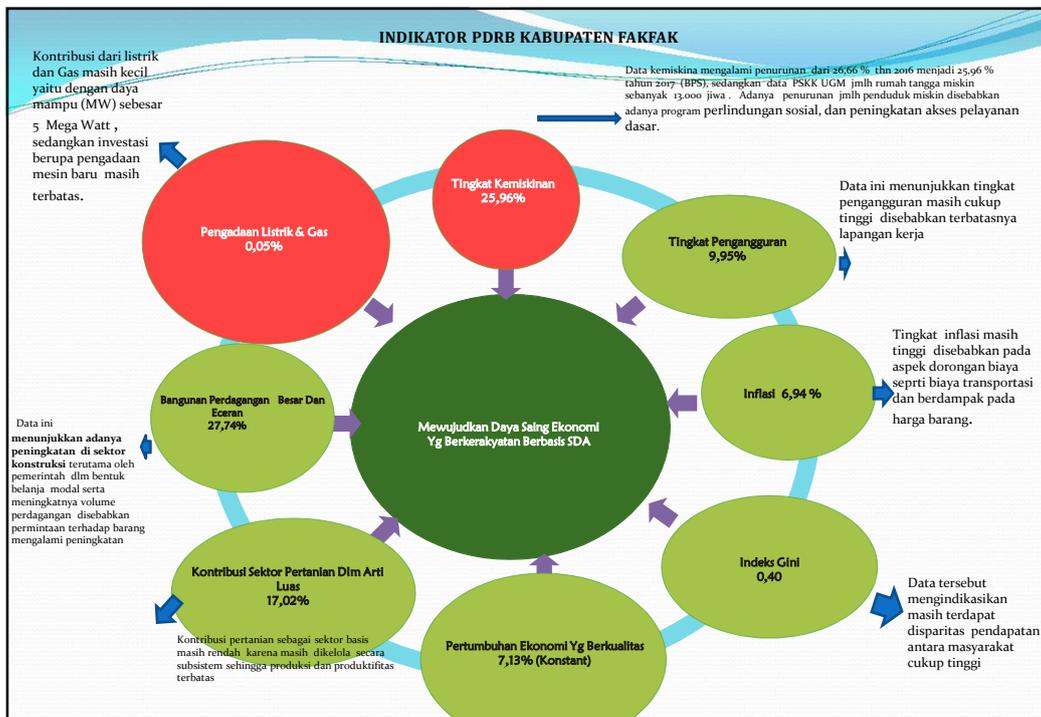
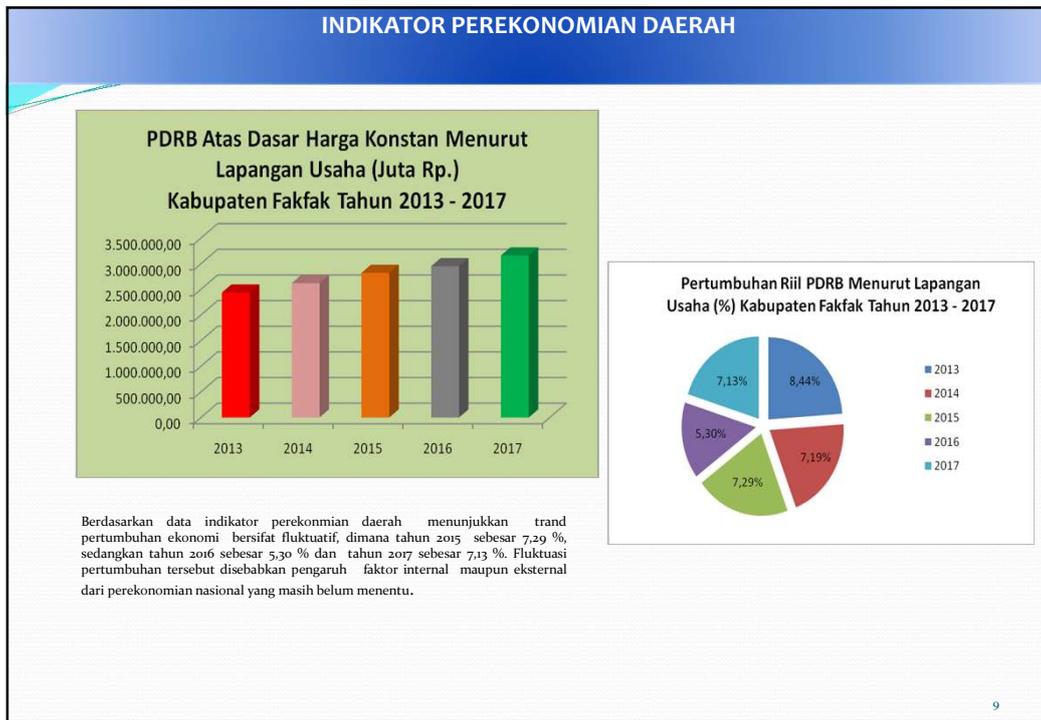


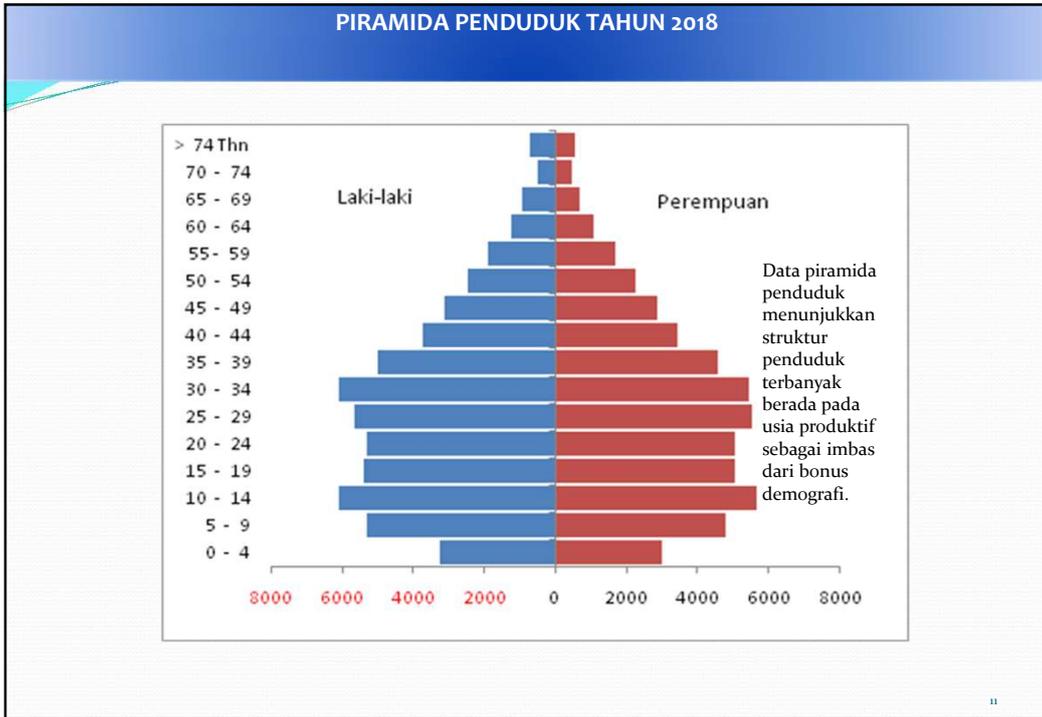
Misi

5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan bersih, transparan dan akuntabel, serta pematapan kehidupan berpolitik dan hukum yang berkeadilan dan menjamin persatuan dan kesatuan dalam NKRI.
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur secara proporsional dan merata melalui ketersediaan infrastruktur wilayah perkotaan dan perdesaan yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya serta mitigasi bencana.
7. Meningkatkan peran dan kapasitas adat serta budaya daerah yang menjamin harmonisasi dalam heterogenitas agama, suku dan adat istiadat serta optimalisasi otonomi khusus untuk kesejahteraan Masyarakat Asli Papua.

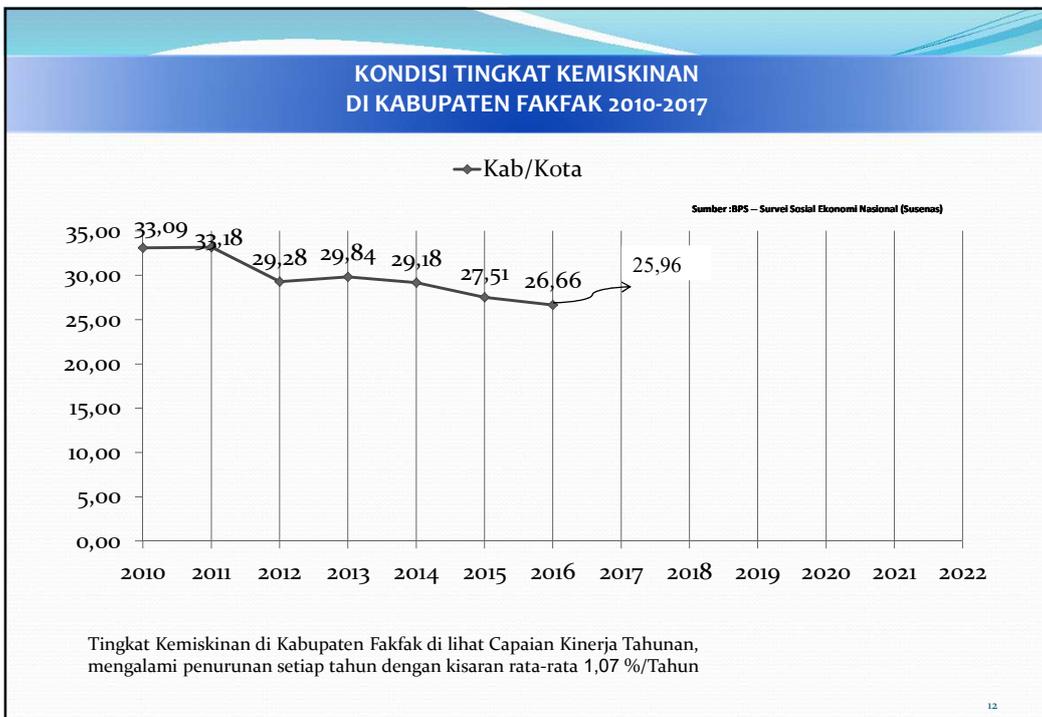




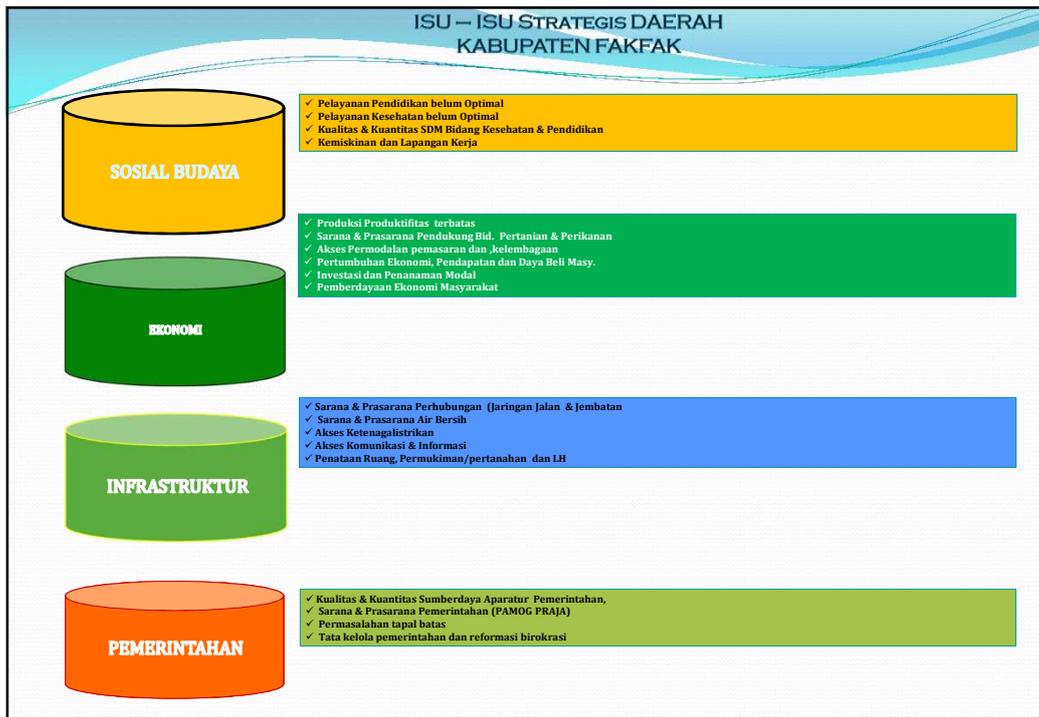




11



12



KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN FAKFAK TAHUN 2016-2021

1. Peningkatan Keimanan dan Ketakwaan
2. Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia
3. Peningkatan Kualitas hidup masyarakat
4. Peningkatan Investasi dan daya saing ekonomi daerah melalui Pemberdayaan dan Produktivitas Masyarakat
5. Peningkatan kualitas birokrasi pemerintah daerah
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah
7. Peningkatan kapasitas adat dan harmonisasi kehidupan sosial
8. Peningkatan kualitas pengendalian lingkungan hidup dan tata ruang

Program Unggulan Daerah Tahun 2016-2021

1. **GERBANG KACA** (Gerakan Membangun Kampung Bercahaya)
2. Bantuan Beasiswa 1000 Mahasiswa Asal Kab. Fakfak
3. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
4. Penerapan E-Government
5. Penerapan Standart Pelayanan Publik dan SPM Urusan Wajib
6. Mendukung Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi
7. Peningkatan Program Strategis Kabupaten (Infrastruktur Jalan, Rencana Bandara Siboru, dan Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh KSCT)
8. Penataan Kawasan Perkotaan Fakfak
9. Peningkatan Program Fakfak Terang
10. Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah




PRINSIP PENDEKATAN PEMBANGUNAN

1. Prinsip Pemerintahan; Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)
2. Prinsip Kestinambungan; Pembangunan Secara Terencana, Kemajuan terus menerus, Berkelanjutan (Sustainable Development)
3. Prinsip Partisipatif; Masyarakat turut serta dalam proses Perencanaan dan Pembangunan.
4. Prinsip Bottom Up; Pembangunan di Tingkat Yang Paling Bawah.
5. Prinsip Terbuka dan Demokratis; Dilaksanakan secara transparan, berskala prioritas dan akuntabel.

**KOLABORASI PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM
MENDUKUNG PEMBANGUNAN**





• Selesai

22

SIGNIFIKANSI PEMBENTUKAN FORUM KERJASAMA MULTI PIHAK UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

Oleh :
Dr. Hariawan Bihamding
Widyaiswara Ahli Madya - BPSDM Kemendagri



Disampaikan pada Workshop Pembangunan Daerah bagi
Aparatur Pemerintah Kab. Fakfak
(Fakfak, 20 Mei 2019)



Biodata Singkat

Dr. Drs. Hariawan Bihamding, MT.

Lahir di Sengkang, 14 Mei 1974

D3 - STPDN (IPDN) 1995

S1 - IIP Jakarta 2000

S2 - ITS Surabaya 2002

S3 - Unpad Bandung 2013

Widyaiswara Ahli Madya

BPSDM - Kemendagri

Hp. 081327663779

Status :Menikah 1 istri, 5 anak

Email : bihamding.hariawan@yahoo.com

Alamat Rumah : Jln Damai III/16 Pejaten Timur - Jaksel



BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA -

APA ITU PEMBANGUNAN ?

Pembangunan adalah :

- Proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik
- Melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Ginandjar Kartasasmita, 1996

Tujuan Pembangunan :

1. Peningkatan standar hidup (*levels of living*) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.
2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan **tumbuhnya rasa percaya diri** (*self-esteem*) setiap orang.
3. Peningkatan kebebasan (*freedom/democracy*) setiap orang.

Todaro, 2000

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA -

3

ANATOMI PEMBANGUNAN

Pembangunan : upaya untuk mengubah keadaan menuju kondisi yang lebih baik/lebih sejahtera.

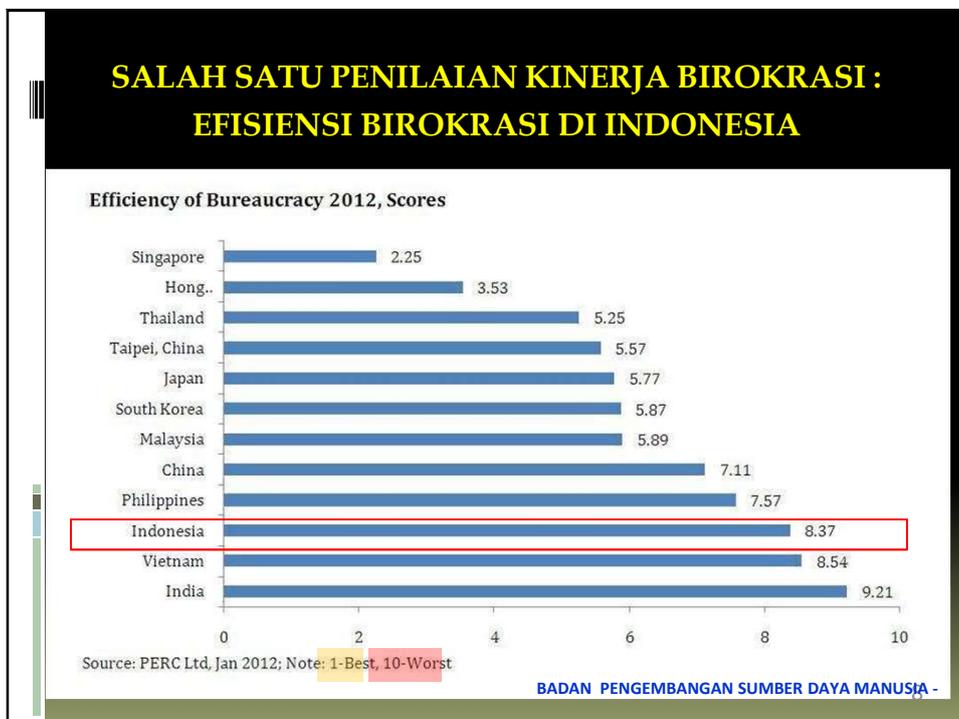
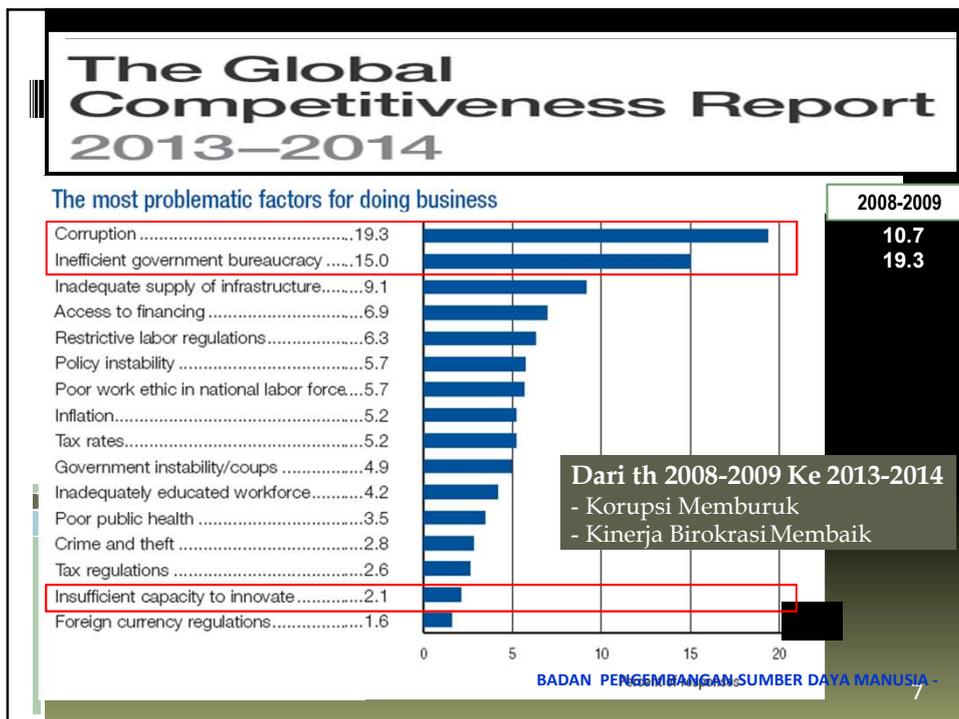
Unsur penting yang diperlukan untuk pembangunan daerah adalah :

1. Kebijakan Pemerintah, untuk meletakkan arah penggunaan sumber daya pada sasaran yang tepat dan menghadirkan regulasi yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh *value added* yang maksimal.
2. Ketersediaan Infrastruktur, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menjalankan usaha dengan biaya yang relatif rendah.
3. Ketersediaan Modal, alat untuk melakukan proses produksi;
4. Sumberdaya manusia sebagai faktor produksi utama yang ikut menentukan kualitas dan kuantitas produksi
5. Bahan baku, untuk memberikan keuntungan yang lebih besar dalam dunia usaha.

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA -

4





Posisi Indonesia

GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX (GCI)

Sumber: World Economic Forum



- Tahun 2015, Indonesia peringkat 37 (dari 144 negara) di bawah Singapura (2), Malaysia (18), Thailand (32). Peringkat Indonesia meningkat 1 posisi dari tahun sebelumnya yaitu di peringkat 38.

Negara	Rank of GCI 2015-2016	Subindex		
		Basic Requirements	Efficiency Enhancers	Innovation and sophistication Factors
Singapore	2	1	2	11
Malaysia	18	22	22	17
Thailand	32	42	38	48
Indonesia	37	49	46	33
Philippines	47	66	51	47
Vietnam	56	72	70	88
Lao PDR	83	86	106	103
Cambodia	90	93	101	121
Myanmar	131	128	131	134
Brunei	-	-	-	-

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA -

GLOBAL FOOD SECURITY INDEX (GFSI)

Sumber: The Economist Intelligence Unit

- Tahun 2015, Indonesia peringkat 74 (dari 109 negara) di bawah Singapura (2), Malaysia (34), Thailand (52), Vietnam (65), dan Filipina (72).





Affordability



Availability



Quality and Safety

Indonesia Score

74

Category Rank

Affordability

61.3 category score

72

Category Rank

Availability

61.3 category score

88

Category Rank

Quality and safety

61.3 category score

The Economist Intelligence Unit

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA -



Perencanaan Pembangunan yang Ideal

- **Prinsip partisipatif** : masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
- **Prinsip kesinambungan** : perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.
- **Prinsip holistik** : masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi atau keutuhan konsep secara keseluruhan.
- Mengandung **sistem** yang dapat berkembang (*a learning and adaptive system*).
- **Terbuka dan demokratis** (*a pluralistic social setting*).

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA -
11

Kebijakan Pembentukan Forum Multi Pihak

Pada Pasal 2 UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanahkan bahwa :

1. Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip **kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional**.
2. Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara **sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan**.
3. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan **Asas Umum Penyelenggaraan Negara**.

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA -
12

Kebijakan Pembentukan Forum Multi Pihak

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk :

- a. mendukung **koordinasi antarpelaku pembangunan**;
- b. menjamin terciptanya **integrasi, sinkronisasi, dan sinergi** baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi, pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. menjamin **keterkaitan dan konsistensi** antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan **partisipasi masyarakat**; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 13

Dasar Hukum Pembentukan Forum Multi Pihak

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
4. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019;

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 14

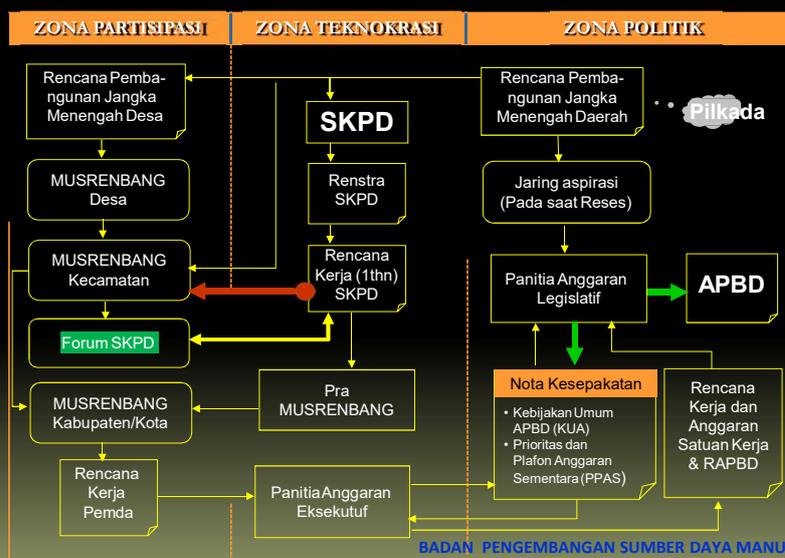
Lanjutan..

7. Permendagri No. 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Permendagri No. 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

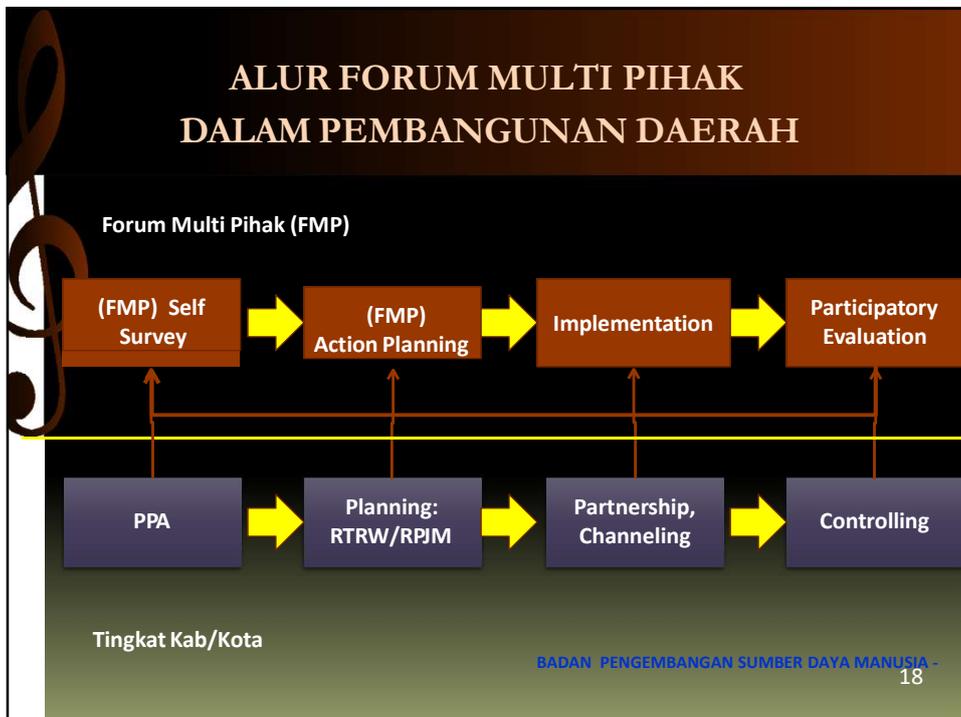
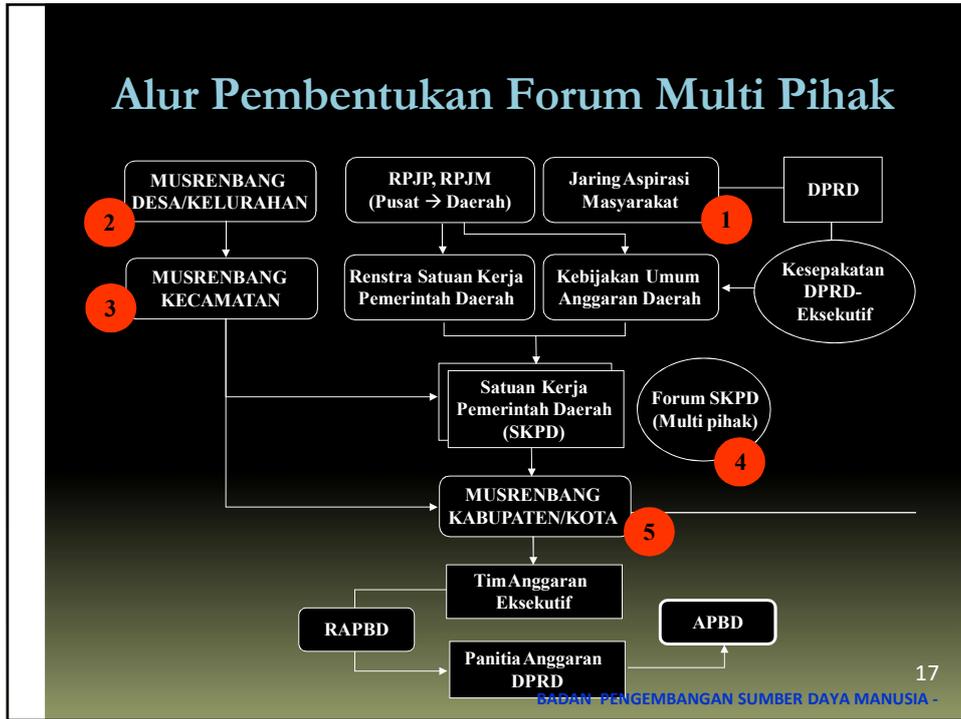
15

Zonasi Pembentukan Forum Multi Pihak Dalam Pembangunan Daerah



BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

16



TUJUAN PEMBENTUKAN FORUM MULTI PIHAK

1. Mengurangi kesenjangan antar sektor secara lebih terarah dan sistematis dengan skenario yang disepakati semua pihak
2. Meningkatkan keterkaitan dan keterlibatan secara komprehensif dalam rangka memperkuat pertumbuhan perekonomian
3. Mendorong terciptanya sinergitas dan mengurangi ego sektoral dalam menghadapi tantangan pembangunan

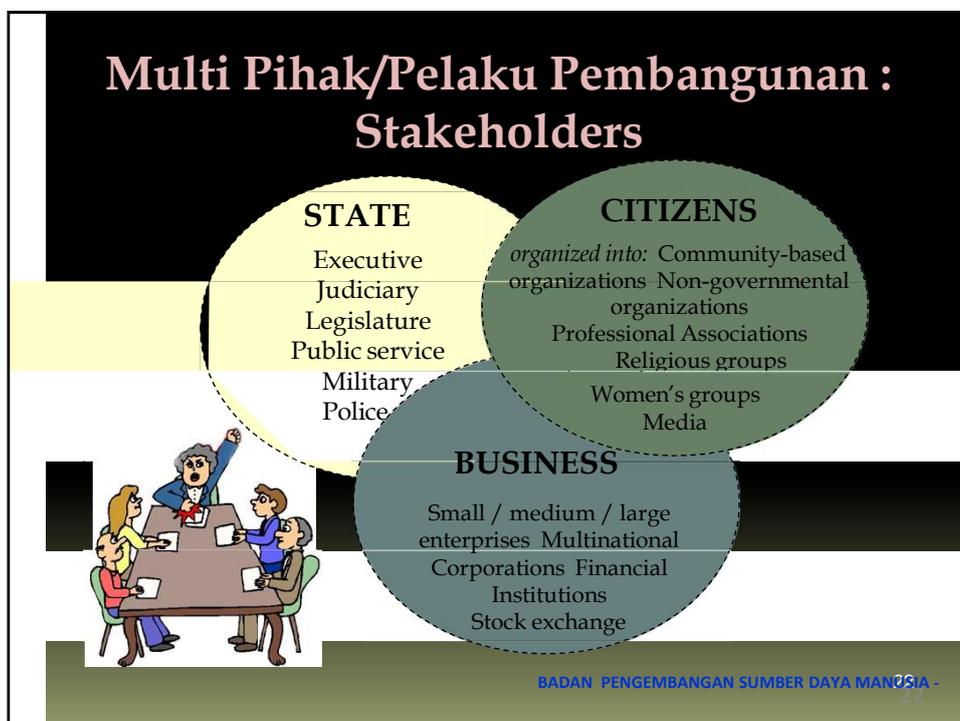
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA -
19

AGENDA UNTUK MEMPERKUAT FORUM MULTI PIHAK

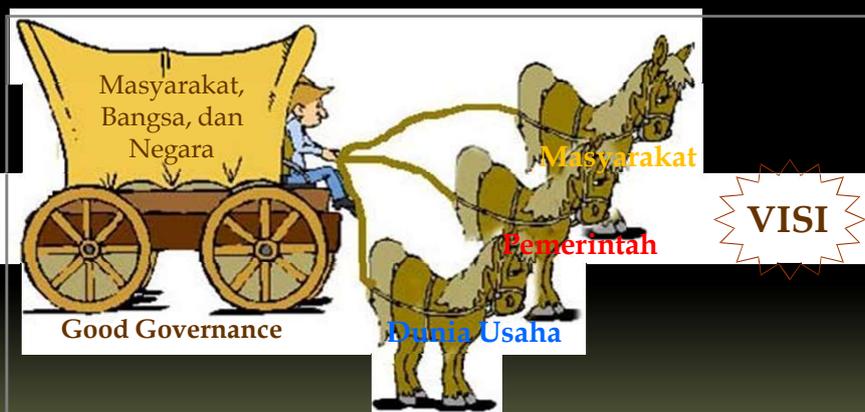
Sinergitas antar-stakeholders dilakukan secara menyeluruh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, yang mencakup **sinergi dalam :**

1. Perencanaan kebijakan.
2. Kerangka regulasi.
3. Kerangka anggaran.
4. Kerangka kelembagaan
5. Kerangka pengembangan wilayah

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA -
20

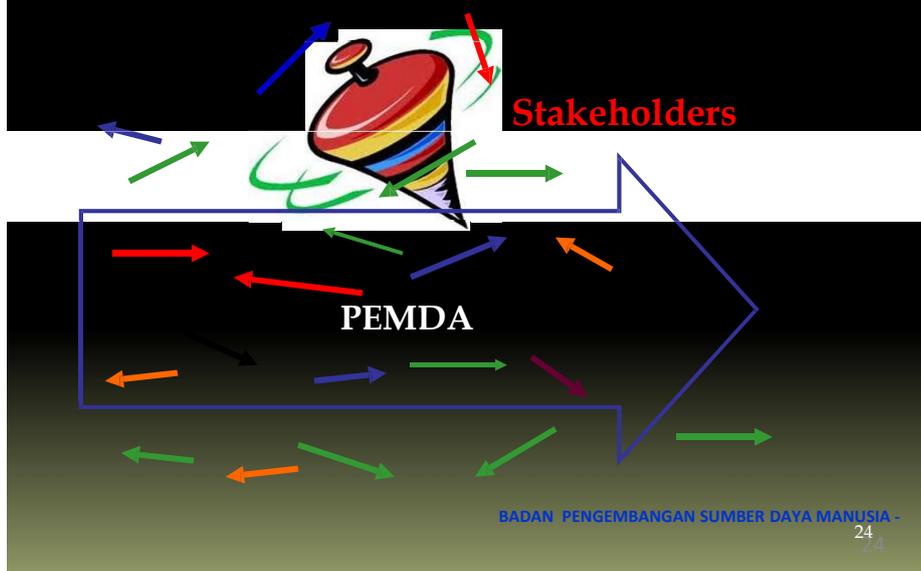


Troika : Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat

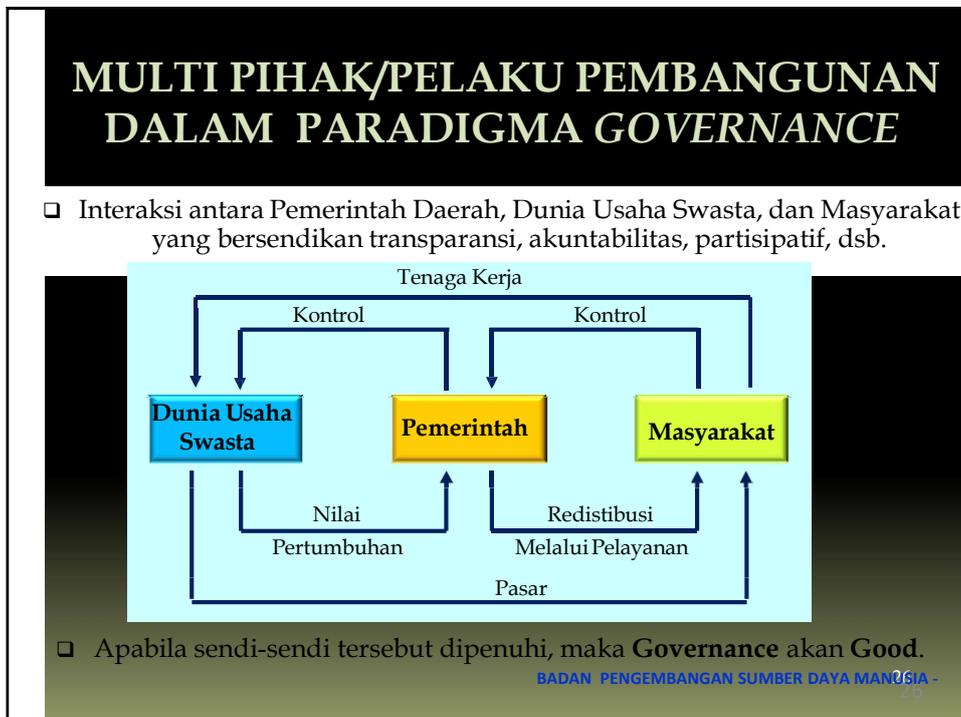


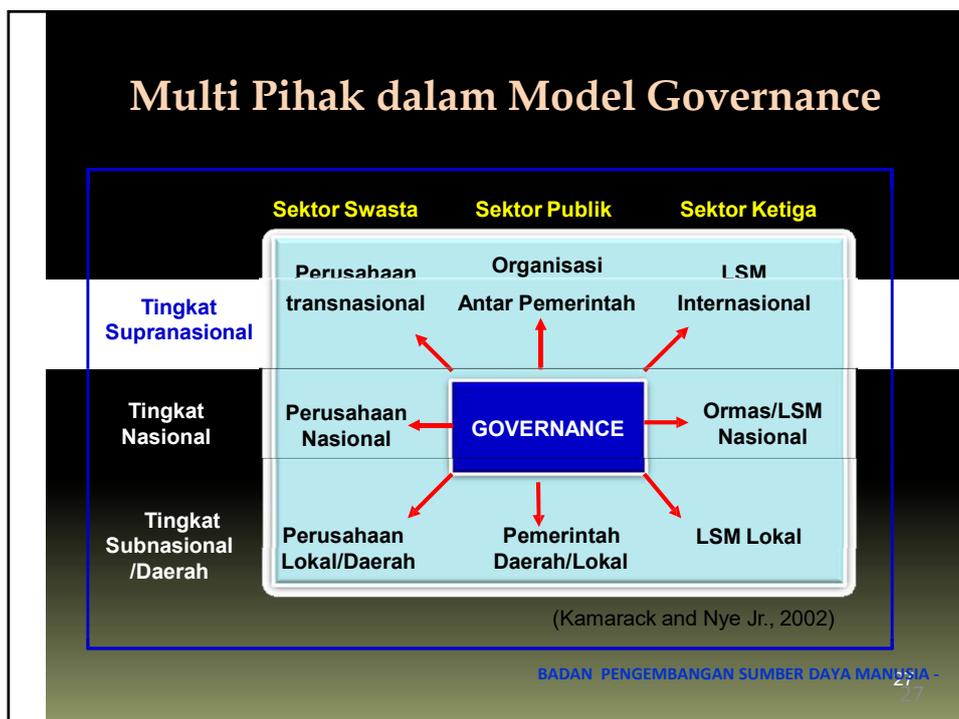
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - 23

Perumusan Visi Daerah



BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - 24





PENYEBAB DAERAH MENGALAMI KESULITAN DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN

1. Prasarana dan Sarana.

Keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi, transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya yang menyebabkan masyarakat di daerah tersebut mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.

2. Kebijakan Pembangunan.

Disebabkan oleh beberapa kebijakan yang tidak tepat seperti kurang memihak pada pembangunan daerah, kesalahan pendekatan dan prioritas pembangunan, serta tidak dilibatkannya kelembagaan masyarakat adat dalam perencanaan dan pembangunan.

3. Sumber Daya Manusia.

Pada umumnya masyarakatnya mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relatif rendah serta kelembagaan adat yang belum berkembang.

4. Sumber Daya Alam.

Beberapa daerah tidak memiliki potensi sumber daya alam, atau daerah yang memiliki sumber daya alam yang besar namun lingkungan sekitarnya merupakan daerah yang dilindungi atau tidak dapat dieksploitasi, dan atau akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan.

Lanjutan..

1. Pengelolaan potensi sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian daerah masih belum optimal.
2. Koordinasi antarpelaku pembangunan di daerah masih lemah.
3. Tindakan afirmatif kepada daerah belum optimal.
4. Aksesibilitas daerah terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah investasi yang membelenggu dan masih rendah.
5. Regulasi mengakibatkan ekonomi biaya tinggi hampir di seluruh daerah di Indonesia.

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA -

29

Dampak Tidak Adanya Forum Kerjasama Multi Pihak

1/4

✓ **Penyusunan perencanaan pembangunan tidak tepat, mungkin karena :**

- Informasi dan datanya kurang lengkap,
- Ego sektoral;
- Metodologinya belum dikuasai,
- Perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana
- Pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.



BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA -

30

Dampak Tidak Adanya Forum Kerjasama Multi Pihak

2/4

- ✓ Perencanaan pembangunan mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.
 - Kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya.
 - Aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,
 - Masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya.



BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA -

31

Dampak Tidak Adanya Forum Kerjasama Multi Pihak

3/4

- ✓ Perencanaan pembgn mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.

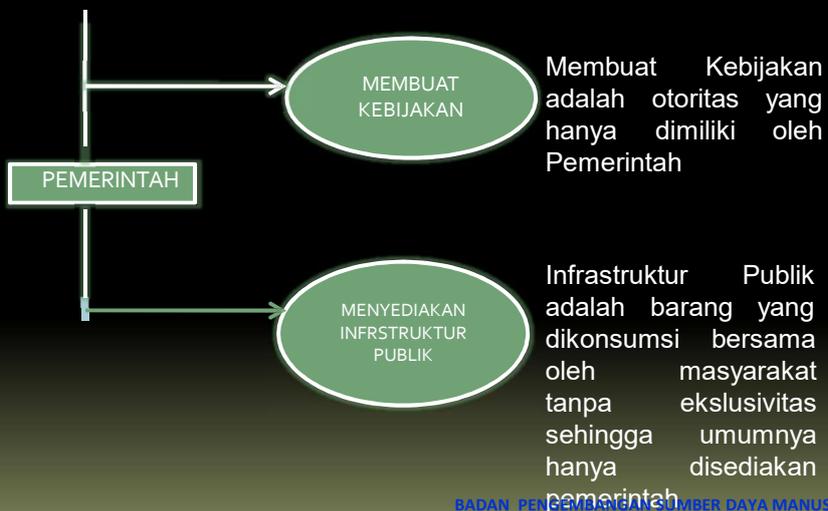
- Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan.
- Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu dengan mengabaikan koordinasi.



BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA -

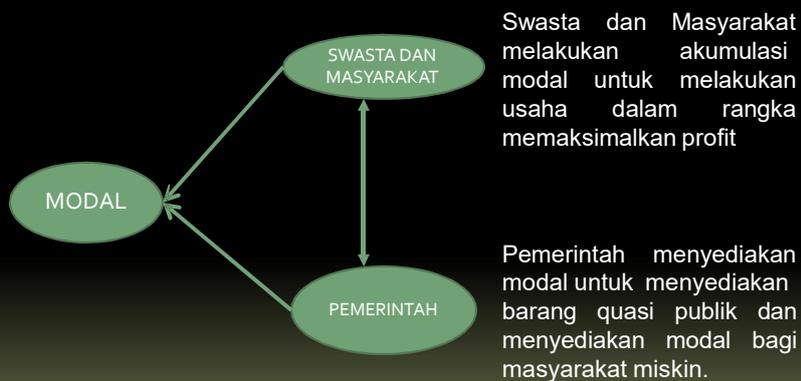
32

PERAN PARA PELAKU PEMBANGUNAN



33

PERAN PARA PELAKU PEMBANGUNAN



34

PERAN PARA PELAKU PEMBANGUNAN



BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA -

35

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN

Strategi percepatan pembangunan adalah upaya/cara untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA -

36

STRATEGI PERCEPATAN : PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR (SEBAGAI LANDASAN PERTUMBUHAN EKONOMI)

Penyediaan infrastruktur merupakan kunci utama percepatan pembangunan daerah tertinggal terutama jalan dan jembatan. Penyedia infrastruktur memerlukan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu perlu dilakukan dorongan besar (*big push*) dengan cara :

1. Pemerintah Kabupaten melakukan efisiensi anggaran dan memfokuskan alokasi lebih besar kepada infrastruktur.
2. Melakukan *lobby* kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi.

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA -

37

STRATEGI PERCEPATAN : PEMBENAHAN REGULASI (SEBAGAI LANDASAN PERTUMBUHAN EKONOMI)

Pembenahan regulasi harus :

1. Mendorong kemudahan usaha : penyederhanaan birokrasi dan prosedur.
2. Mendorong kepastian usaha : jaminan adanya kesinambungan kebijakan pemerintah.
3. Mendorong efisiensi usaha : menghindari pungutan dan biaya yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.
4. Mendorong keamanan usaha : jaminan perlindungan fisik dan non fisik terhadap investasi masyarakat dan swasta.

Catatan :

1. Ukuran keberhasilan suatu daerah bukan hanya diukur dari jumlah pendapatan asli daerah yang diterima, namun diukur dari seberapa besar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
2. Mengumpul PAD tidak boleh melemahkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA -

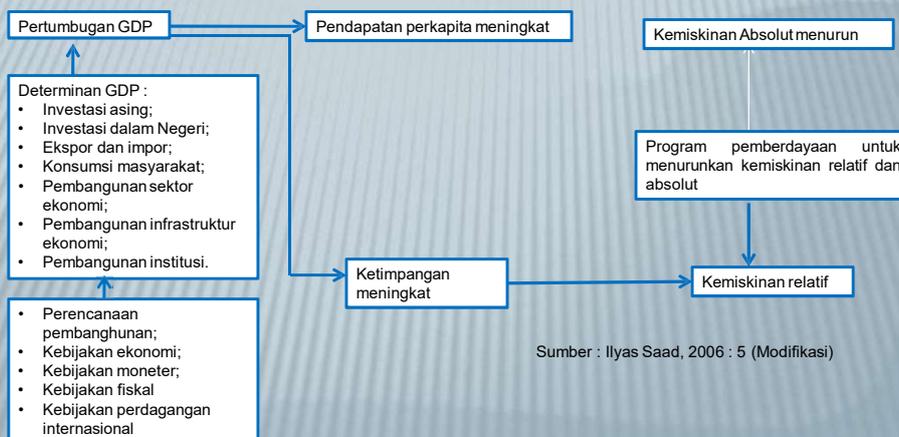
ASPEK DAYA SAING DAERAH YANG TERENDAH

Daya Saing Global (World Competitiveness Report 2008)	Tata Kelola Ekonomi Daerah (KPPOD 2008)
<ul style="list-style-type: none"> - Infrastruktur - Penerapan teknologi - SDM pendidikan tinggi dan keahlian - Kelembagaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Iklim dunia usaha - Infrastruktur fisik daerah - Wawasan pengembangan usaha - Kemitraan publik dan dunia usaha

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA -

STRATEGI PERCEPATAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN

Skema Pertumbuhan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Kurang Mampu



Sumber : Ilyas Saad, 2006 : 5 (Modifikasi)

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA -

LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS



-  Diperlukan *law enforcement* yang konsisten untuk mengurangi high cost di semua sektor ekonomi
-  Merubah *Rent-seeking society* menjadi *entrepreneurship society*
-  Untuk mendukung point tersebut di atas, diperlukan pendidikan dan ketrampilan bagi percepatan program-program ekonomi kreatif
-  Program Reformasi Birokrasi
-  Program peningkatan daya saing oleh masing-masing Sektor (Industri, Koperasi dan UKM, Pertanian, Perikanan, Kehutanan)
-  Koordinasi dan Konsultasi antara instansi pemerintah dan dengan dunia usaha secara reguler

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA -

KOMPONEN KUNCI YAKNI KEPEMIMPINAN YANG EFEKTIF

- Collaboration*
- Trust*
- Shared power*
- Flexibility*
- Entrepreneurialism*

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA -

42

STRATEGI PERCEPATAN PERTUMBUHAN : PENYEDIAAN MODAL UNTUK MASYARAKAT KURANG MAMPU

Kegagalan program pengentasan kemiskinan yang memberikan bantuan modal untuk masyarakat miskin disebabkan oleh :

1. Bantuan yang hanya bersifat stimulan;
2. Umumnya dibatasi dalam jangka waktu tertentu yang belum tentu sesuai dengan siklus usaha masyarakat;
3. Pemilihan jenis usaha tidak sesuai dengan lama waktu bantuan;
4. Pemilihan jenis usaha kurang memperhatikan potensi yang dimiliki oleh masyarakat kurang mampu;
5. Tidak memperhatikan aspek *demand* dari produk yang dihasilkan.

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA -

43

STRATEGI PERCEPATAN PERTUMBUHAN : PENYEDIAAN MODAL UNTUK MASYARAKAT KURANG MAMPU

Pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan modal harus :

1. Bantuan sesuai dengan kebutuhan modal yang diperlukan oleh masyarakat untuk investasi;
2. Sebaiknya bukan bantuan modal bergilir atau bantuan modal bergilir untuk jangka waktu yang sesuai dengan waktu produksi usaha;
3. Jenis usaha harus sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masyarakat;
4. Pemerintah membantu melakukan analisis *demand-supply* terhadap usaha yang akan dilaksanakan termasuk menilai peluang pasar terhadap produk yang dihasilkan.

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA -

44

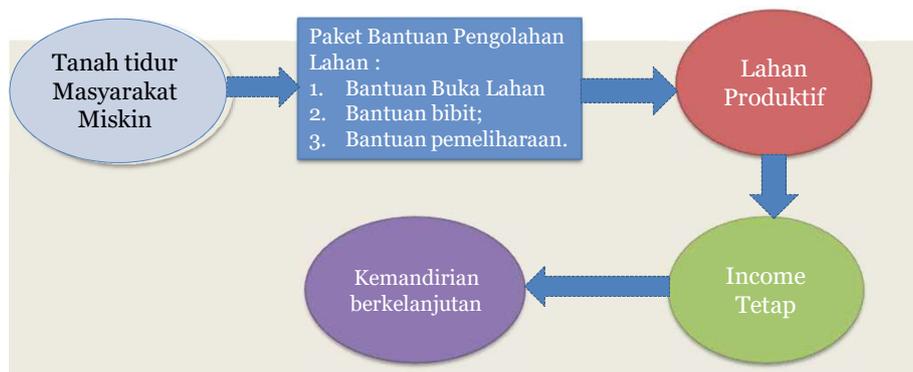
BEBERAPA PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DAN KETERTINGGALAN

No	Program	sasaran
1	Program KUT/KCK	Peningkatan produktivitas petani
2	Inpres Desa Tertinggal	Bantuan Modal Usaha (kelompok)
3	P3DT	Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
4	P2D	Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
5	Takesra/Kukesra	Masyarakat Pra Sejahtera/Sejahtera I
6	PNPM	Penyediaan fasilitas pelayanan; Penyediaan infrastruktur ekonomi masyarakat pedesaan; Penguatan kelembagaandes; Pembangunan SDM; Bantuan modal.

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA -
45



BEBERAPA PROGRAM YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN

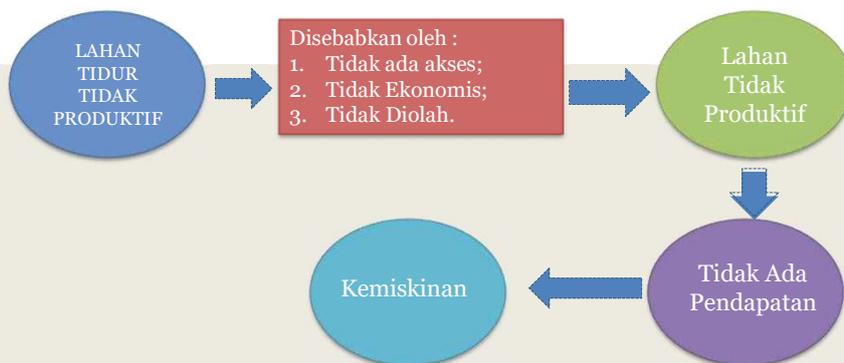


Penghasilan tetap dari hasil pengolahan tanah masyarakat miskin akan dapat digunakan untuk meningkatkan SDM generasi berikutnya.

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA -

47

BEBERAPA PROGRAM YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN



Ketersediaan Akses menuju lahan masyarakat akan menentukan tingkat ekonomi lahan tersebut.

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA -

48

BEBERAPA PROGRAM YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN



BEBERAPA PROGRAM YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN

PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN

Pemerintah Daerah :

1. Melakukan pengkajian untuk mengetahui produk unggulan yang mempunyai kemampuan daya saing dan memberikan nilai ekonomi tinggi bagi masyarakat.
2. Membantu permodalan;
3. Memberikan bantuan teknis;
4. Membantu membangun jaringan pemasaran.
5. Melmbentu menyediakan bahan input;
6. Membantu membangun sistem perlindungan hasil produksi.

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA -

50

STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Masyarakat miskin umumnya tidak mempunyai naluri bisnis dan karena kemiskinan cenderung mendorong mereka konsumtif apabila diberikan bantuan, untuk itu bantuan pemberdayaan kepada masyarakat kurang mampu harus :

1. Diupayakan tidak memberikan bantuan dana langsung yang pemanfaatannya tidak bisa dikendalikan;
2. Berikan keyakinan bahwa bantuan yang diberikan akan mampu membawa hasil terhadap dirinya dalam jangka panjang;
3. Program yang diberikan harus sesuai dengan latar belakang dan pengalaman peserta;
4. Bangunlah sistem pengendalian yang efektif;
5. Program harus didesain untuk mampu memberikan dukungan secara penuh terhadap usaha yang akan dijalankan oleh masyarakat miskin.

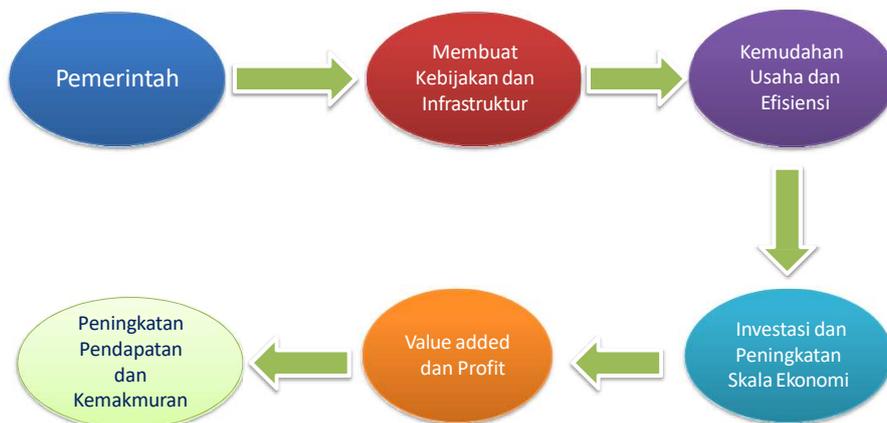
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA -
51

STRATEGI PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Keberanian untuk memilih prioritas pembangunan, sebaiknya prioritas utama adalah pembangunan infrastruktur;
2. Melakukan pinjaman lunak baik kepada pemerintah maupun kepada pihak lain;
3. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga terutama untuk kegiatan yang berorientasi profit;
4. Melakukan efisiensi birokrasi agar alokasi dana pelayanan publik menjadi lebih besar.

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA -
52

Kerangka Logis Percepatan Pembangunan



BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA -

53

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERHASIL

- Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat.
- Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar.
- Pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta.



BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA -

54



**PEMETAAN STAKEHOLDERS
UNTUK MENDUKUNG
PEMBANGUNAN YANG
BERKELANJUTAN DI KABUPATEN
FAKFAK**

Tim Kemitraan

FAKFAK, 20-21 Mei 2018



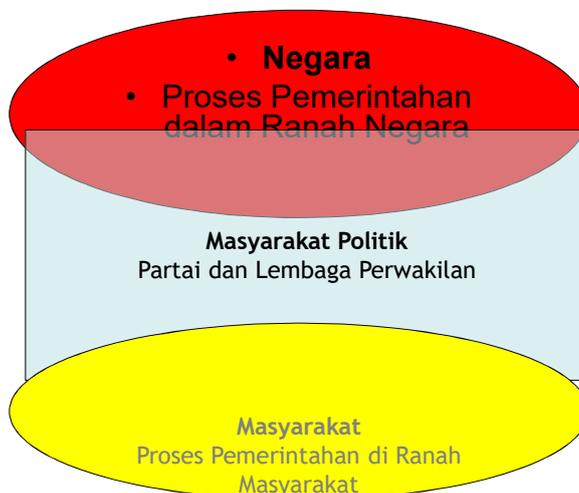
www.kemitraan.or.id

**KONSEPSI GOVERNANCE SEBAGAI
KONTEKS KERJA SAMA ANTAR
PEMANGKU KEPENTINGAN**



www.kemitraan.or.id

RELASI NEGARA DAN MASYARAKAT



www.kemitraan.or.id

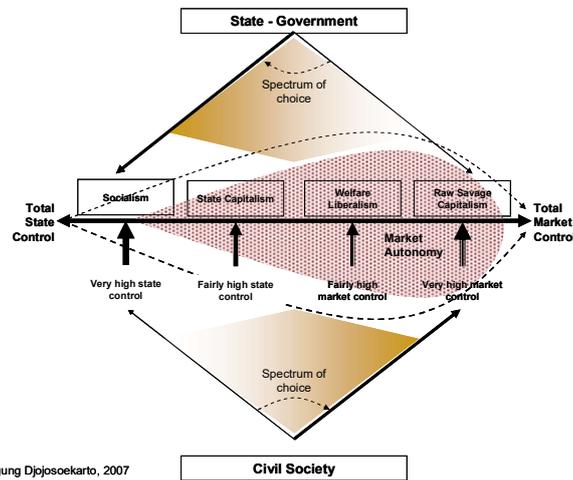
KONSEPSI GOVERNANCE SEBAGAI EKSPRESI PERUBAHAN CARA PANDANG NEGARA

- Di masa yang lalu, pemerintah mempunyai peranan dominan untuk penyediaan fungsi-fungsi pelayanan dasar dalam rangka mewujudkan tanggung jawabnya guna mengatur masyarakat.
- Hari ini, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melibatkan banyak warga negara, institusi-institusi publik, perusahaan swasta dan NGO dalam pengembangan dan implementasi pelayanan publik.
- Untuk proses ini, kita dapat mengatakan bahwa yang terjadi bukan hanya pemerintahan, tetapi lebih merujuk pada proses governance.



www.kemitraan.or.id

MODEL PENGENDALIAN



© Agung Djosoekarto, 2007



www.kemitraan.or.id

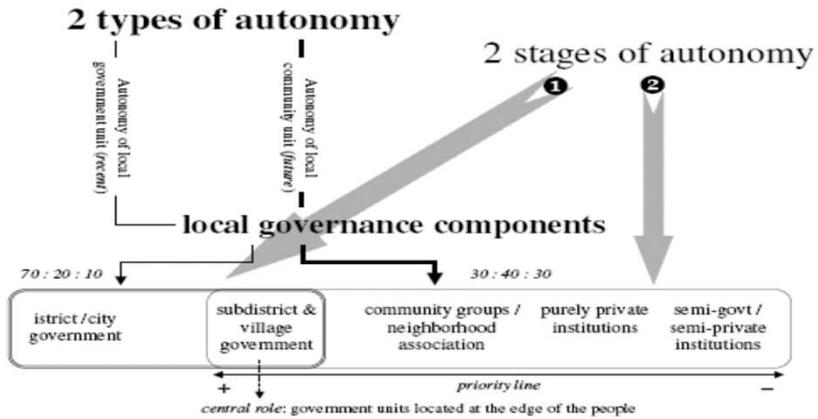
KARAKTER UTAMA

Karakteristik	Negara	Ekonomi-Pasar	Masyarakat Sipil
Basis lokus/material	Pemerintahan	Pasar	Warga negara
Modal atau daya	Birokrasi dan administrasi	Barang-jasa dan uang	Daya social
Motif	Stabilitas politik dan ekonomi	Keuntungan maksimal	Kesejahteraan dan hak politik
Kepentingan utama	Pembangunan dan pemerataan Otoritas dan legitimasi	Stabilitas kebijakan ekonomi Stabilitas social	Pembangunan negara Upah dan imbalan yang memadai
Intermediasi garis depan	Unit-unit pelayanan publik di tingkat nasional dan daerah	Forum lobby dan kelompok kepentingan serta good corporate governance	Partai politik dan asosiasi independen



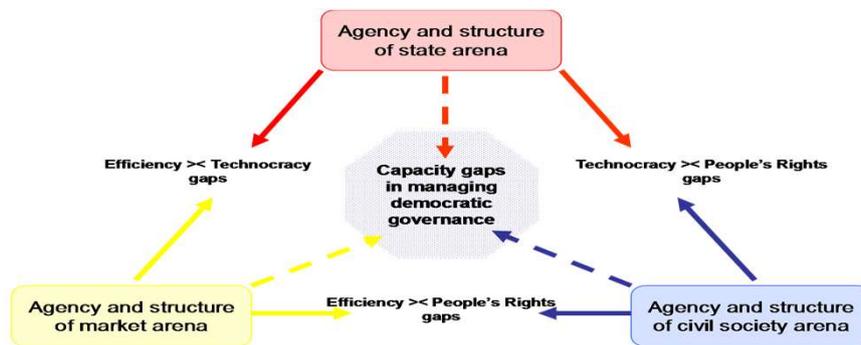
www.kemitraan.or.id

KONSEPSI GOVERNANCE DECENTRALIZATION



www.kemitraan.or.id

SKEMA INTERAKSI PROGRAMATIK



© Agung Djojosoekarto 2007



www.kemitraan.or.id

PEMETAAN PEMANGKU KEPENTINGAN



www.kemitraan.or.id

PENGERTIAN PEMANGKU KEPENTINGAN

- Pemangku kepentingan' menurut definisinya adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan untuk keberlanjutan tata kelola pemerintahan.
- Pemangku kepentingan juga telah didefinisikan lebih sempit lagi di mana Pemangku kepentingan didefinisikan sebagai suatu kelompok atau individu yang menanggung suatu jenis risiko baik karena mereka telah terlibat dalam proses pembuatan kebijakan public secara langsung, ataupun karena mereka menghadapi risiko akibat kegiatan pembuatan kebijakan publik tersebut.



www.kemitraan.or.id

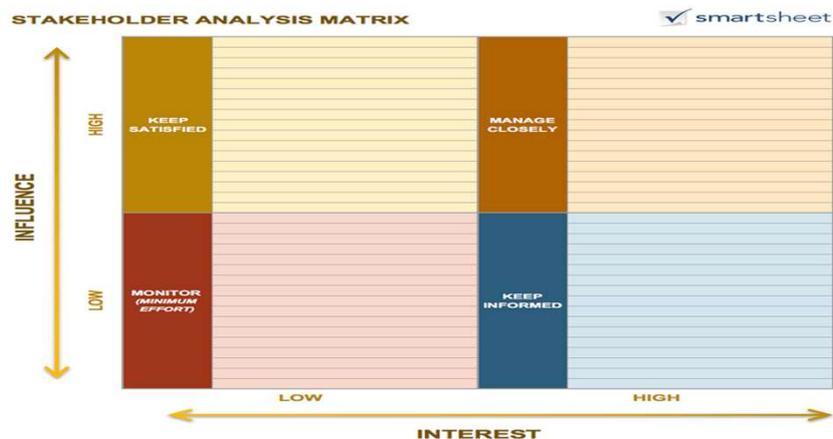
KATEGORI PEMANGKU KEPENTINGAN

- Pemangku kepentingan utama (primary stakeholder), merupakan pemangku kepentingan yang secara langsung terkena dampak, baik positif maupun negatif dari adanya kebijakan publik.
- Pemangku kepentingan kunci (key stakeholder), merupakan pemangku kepentingan yang secara legalitas memiliki kewenangan atau dengan kata lain memiliki pengaruh dan kepentingan yang tinggi dalam pengambilan keputusan pada proses pembuatan kebijakan publik.
- Pemangku kepentingan pendukung (secondary stakeholder), merupakan pemangku kepentingan sebagai perantara dalam proses implementasi kebijakan publik ataupun pihak-pihak yang tidak memiliki kaitan secara langsung tetapi memiliki kepedulian atas keputusan kebijakan publik.



www.kemitraan.or.id

MENENTUKAN STAKEHOLDERS PRIORITAS



www.kemitraan.or.id

MENENTUKAN STAKEHOLDERS PRIORITAS

- Berkaitan dengan derajat kepentingan, dapat diidentifikasi:
 1. Tinggi: memiliki harapan, aspirasi dan manfaat potensial yang tinggi atas terwujudnya kebijakan publik.
 2. Sedang: memiliki harapan dan aspirasi tetapi tidak menerima manfaat potensial secara langsung dari terwujudnya kebijakan publik.
 3. Rendah: Tidak memiliki harapan, aspirasi dan manfaat potensial atas terwujudnya kebijakan publik.



www.kemitraan.or.id

MENENTUKAN STAKEHOLDERS PRIORITAS

- Adapun terkait dengan derajat pengaruh, dapat dipetakan:
 1. Tinggi: memiliki kewenangan penuh dalam membuat kebijakan, memfasilitasi implementasi kebijakan dan memengaruhi pihak lain dalam membuat kebijakan publik.
 2. Sedang: memiliki kewenangan yang terbatas dalam membuat kebijakan, memfasilitasi implementasi kebijakan dan memengaruhi pihak lain dalam membuat kebijakan publik.
 3. Rendah: tidak memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan, memfasilitasi implementasi kebijakan dan memengaruhi pihak lain dalam membuat kebijakan publik.



www.kemitraan.or.id

MENENTUKAN STAKEHOLDERS PRIORITAS

- **Manage Closely:** Anda harus sepenuhnya melibatkan orang-orang ini, dan melakukan upaya terbesar untuk memuaskan mereka.
- **Keep Satisfied:** cukup bekerja dengan orang-orang ini untuk membuat mereka puas, tetapi tidak terlalu banyak sehingga mereka menjadi bosan dengan pesan Anda.



www.kemitraan.or.id

MENENTUKAN STAKEHOLDERS PRIORITAS

- **Keep Informed:** cukup beri tahu orang-orang ini, dan berbicaralah dengan mereka untuk memastikan bahwa tidak ada masalah besar yang muncul. Orang-orang dalam kategori ini seringkali dapat sangat membantu dengan detail proyek Anda.
- **Monitor:** sekali lagi, pantau orang-orang ini, tetapi jangan membuat mereka bosan dengan komunikasi yang berlebihan.



www.kemitraan.or.id



RENCANA TINDAK LANJUT FORUM PEMANGKU KEPENTINGAN DI KABUPATEN FAKFAK

Tim Kemitraan

Fakfak, 20-21 Mei 2018



www.kemitraan.or.id

MENENTUKAN JENIS FORUM PEMANGKU KEPENTINGAN BERDASARKAN TUJUANNYA



www.kemitraan.or.id

TUJUAN FORUM PEMANGKU KEPENTINGAN

Forum Komunikasi

- Tujuan forum ini adalah untuk menentukan mekanisme bagaimana pihak satu dengan pihak yang lain saling bertukar informasi dan berkomunikasi secara efektif melalui sebuah media saluran informasi.
- Karakteristik utama forum komunikasi adalah wadah bersama untuk tukar menukar informasi antar pihak.
- Cara kerja forum komunikasi adalah dengan memperdayakan media saluran komunikasi yang didukung oleh beragam alat komunikasi dengan tujuan sesuai dengan kebutuhan informasi internal maupun eksternal.



www.kemitraan.or.id

TUJUAN FORUM PEMANGKU KEPENTINGAN

Forum Koordinasi

- Tujuan forum koordinasi adalah menentukan bagaimana pihak satu dengan pihak yang lain bertemu untuk membahas sebuah agenda atau rencana kerja, terutama membahas isu-isu teknis penyelenggaraan program atau agenda kerja bersama.
- Dalam forum koordinasi ini lebih banyak berbicara soal siapa mengerjakan apa, bagaimana caranya, dan siapa bertanggung jawab atas apa.
- Target prioritas adanya forum koordinasi ini adalah terbentuknya media koordinasi yang lebih efektif dan terorganisir secara bagus.



www.kemitraan.or.id

TUJUAN FORUM PEMANGKU KEPENTINGAN

Forum Pengambilan Kebijakan

- Tujuan forum pengambilan kebijakan adalah menentukan bagaimana sebuah keputusan dibuat, bisa melalui konsensus, pemilihan suara terbanyak, atau quorum.
- Forum pengambilan kebijakan tersebut juga menjadi forum dialog atau musyawarah untuk menentukan atas dasar apa sebuah kebijakan dibuat dan diputuskan.
- Target prioritas dari forum pengambilan kebijakan adalah tersedianya media untuk mendukung proses pembuatan kebijakan. Hasil yang diharapkan oleh forum pengambilan kebijakan adalah hasil keputusan bersama.



www.kemitraan.or.id

Input forum

- Bpk Yoel: karena menyangkut pembangunan daerah, pilihannya adalah forum koordinasi.
- Kakak Emanuel Motombri: sepatutnya dengan pendapat Pak Yoel, forum ini adalah forum koordinasi. Argumentasinya: (1) pengambilan keputusan merupakan wilayah prerogatif masing-masing pihak, (2) penting untuk memikirkan kondisi ke depan, sehingga perlu sinkronisasi melalui forum koordinasi agar para pemangku kepentingan berjalan bersama melalui mekanisme perencanaan satu pintu.



www.kemitraan.or.id

Input forum

- Hasil aklamasi berdasarkan pilihan dari Bapak Joko (Asisten):
- Forum Komunikasi: 1 orang.
- Forum koordinasi: sisanya semua memilih.
- Namanya: Forum Koordinasi Pemangku Kepentingan Untuk Percepatan Pembangunan di Kabupaten Fakfak.



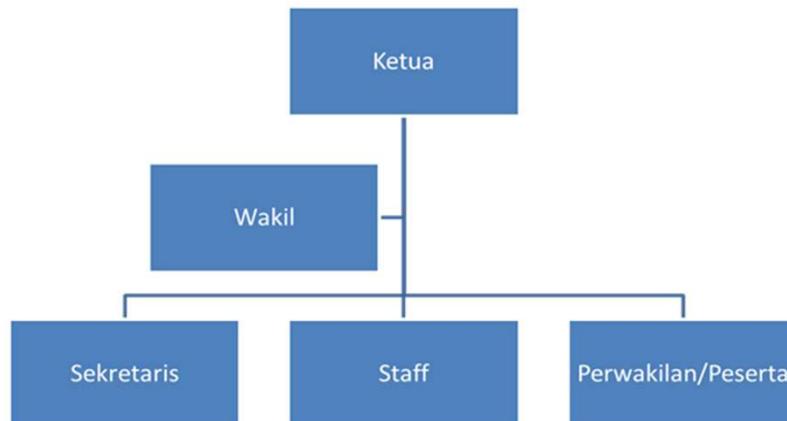
www.kemitraan.or.id

STRUKTUR ORGANISASI FORUM PEMANGKU KEPENTINGAN



www.kemitraan.or.id

STRUKTUR ORGANISASI FORUM PEMANGKU KEPENTINGAN



www.kemitraan.or.id

STRUKTUR ORGANISASI FORUM PEMANGKU KEPENTINGAN

- **Ketua Forum:**

1. Menyatukan para pemangku kepentingan untuk merancang bersama peraturan dan prosedur Forum.
2. Mengusulkan agenda untuk rapat.
3. Mengkoordinasikan operasi Forum dan bertindak sebagai wajah publik Forum di depan lembaga, organisasi, dan media lainnya.
4. Titik kontak tingkat utama.
5. Dalam pertemuan, kursi dapat didelegasikan kepada perwakilan.
6. Bisa ada lebih dari satu ketua, masing-masing mewakili sektor berbeda yang diwakili dalam Forum.



www.kemitraan.or.id

STRUKTUR ORGANISASI FORUM PEMANGKU KEPENTINGAN

- **Wakil Ketua Forum:**

1. Mendukung ketua dan pengganti dalam ketidakhadirannya.
2. Menawarkan peran utama untuk perwakilan dari sektor selain dari yang diwakili oleh ketua (misalnya, ketua dari masyarakat sipil dan wakil ketua dari pemerintah).
3. Berfungsi sebagai strategi suksesi, dengan memiliki ketua bersama memimpin setelah berakhirnya masa jabatan yang disetujui ketua



www.kemitraan.or.id

STRUKTUR ORGANISASI FORUM PEMANGKU KEPENTINGAN

- **Sekretaris Forum:**

1. Menyediakan layanan dukungan sebagai pemimpin operasi dan logistik untuk memungkinkan pengoperasian Forum yang tepat dan efisien.
2. Merumuskan draf dan konsultasikan agenda pertemuan untuk disetujui.
3. Memilih dan menyiapkan tempat pertemuan.
4. Menyiapkan informasi, materi dan merencanakan dinamika pertemuan.
5. Menyiapkan risalah rapat.



www.kemitraan.or.id

STRUKTUR ORGANISASI FORUM PEMANGKU KEPENTINGAN

- **Perwakilan Peserta:**

1. Berpartisipasi dalam diskusi.
2. Memberikan umpan balik teknis dan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan Rencana atau pengembangan kebijakan keterbukaan baru.
3. Diskusikan dan setuju peraturan, prosedur, dan kebijakan internal Forum.
4. Setujui laporan Forum.
5. Menyebarkan informasi tentang kegiatan dan hasil Forum.



www.kemitraan.or.id

STRUKTUR ORGANISASI FORUM PEMANGKU KEPENTINGAN

NO	JABATAN	NAMA
1.	KETUAN FORUM	
2.	WAKIL KETUA FORUM	
3.	PERWAKILAN PEMANGKU KEPENTINGAN	



www.kemitraan.or.id

Kebutuhan Forum

NO	LEVEL INTERVENSI	AGENDA TINDAK LANJUT
1.	LEVEL MAKRO	Dasar Hukum dalam bentuk Peraturan Bupati
2.	LEVEL MEZO	Perlu SOP Kordinasi untuk Tata Kelola Pemerintahan Perlu SOP Kordinasi untuk Pemberdayaan Ekonomi Perlu SOP Kordinasi untuk Pemberdayaan Masyarakat Perlu SOP Organsasi dan Manajemen Forum
3.	LEVEL MIKRO	Sekretariat Forum bertempat di BP4D Fakfak



www.kemitraan.or.id



www.kemitraan.or.id

LAMPIRAN 4. Dokumen Kesepakatan Peserta Loka Karya Pembentukan Forum Pemangku Kepentingan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Fakfak

